

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



# LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**



**BPKAD**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu, Kode Pos 94111  
Telepon (0451) 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411  
Email : [info@sultengprov.go.id](mailto:info@sultengprov.go.id), Website : [www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 15 April 2026





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812

**P A L U**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 000 / 18 02 / BPKAD /**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka menyusun laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Badan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**Drs. AWALUDIN, MM**

Pembina Utama Madya

Nip. 19660306 199803 1 011

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan gambaran mengenai ketercapaian kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang didasari oleh Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan memuaskan dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 970.240.626.787,04,- atau 74,86% dari anggaran sebesar Rp. 1.296.099.853.338,39,- dan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penyerapan anggaran belanja ini mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. keberhasilan capaian kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 merupakan upaya dari semua unsur BPKAD dan *Stakeholder* terkait. Capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kinerja BPKAD di tahun-tahun mendatang semakin meningkat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap memacu pelaksanaan pekerjaan agar terlaksana lebih efisien dan lebih efektif untuk di tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai target. Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi penekanan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam Rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah.

Penyusunan LKIP ini mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja yang transparan, Objektif dan berorientasi pada hasil, dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini telah diupayakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kami berharap LKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Tengah.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palu, 15 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Drs. AWALUDIN, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660306 199803 1 011

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.3. Isu Strategis/Permasalahan .....	19
1.4. Tindak Lanjut LHE Akip .....	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>23</b>
2.1. Renstra Perangkat Daerah .....	23
2.2. Struktur Program dan Kegiatan .....	28
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	32
2.4. Perjanjian Kinerja .....	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>38</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	38
3.2 Realisasi Anggaran .....	81
3.3 Inovasi .....	88
3.4 Penghargaan .....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>90</b>
4.1. Kesimpulan .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Diagram Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	15
Tabel 1.2	Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025	16
Tabel 1.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	19
Tabel 1.4	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	22
Tabel 2.1	Cascading Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	24
Tabel 2.2	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Langsung Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	32
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Renstra (2021-2026)	40
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Renstra (2025-2029)	40
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025 Renstra (2021–2026)	44
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025 Renstra (2025–2029)	45
Tabel 3.5	Capaian Ipkd Perdimensi	47
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Hasil Pengukuran IPA	48
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Hasil Opini BPK-RI	49
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra Renstra (2021–2026)	50

Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra Renstra (2025–2029)	51
Tabel 3.10	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (IPKD)	52
Tabel 3.11	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (WTP)	54
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta	56
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
Tabel 3.14	Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian	62
Tabel 3.15	Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan	82

#### DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	18
-----------	---	----

#### DAFTAR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL DAN PERUBAHAN TAHUN 2025



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN UMUM**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD merupakan perangkat daerah yang dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka, telah terjadi perubahan nomenklatur sehingga terbentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penggabungan dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Kas Daerah dan Bagian Aset Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Permempan RB no 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap perangkat daerah wajib menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan Kinerja BPKAD adalah dokumen akuntabilitas tahunan yang menyajikan pencapaian Target Strategis, Realisasi Anggaran, Efektivitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Selain itu, Laporan Kinerja BPKAD ini mengacu pada Renstra BPKAD tahun 2025 – 2030 dimana dalam Renstra BPKAD tersebut telah

menetapkan rencana kinerja BPKAD selama 5 Tahun berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

1. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

### **2. Sekretaris**

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 1 (Satu) Sub Bagian yaitu :

**(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
2. Uraian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP;
  - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum;
  - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi

Jabatan;

- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

### **3. Bidang Anggaran**

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
  - f. penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.  
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran**

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran.
2. Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
  - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
  - f. melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;
  - g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusun Anggaran;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

**(2) Sub Bidang Manajemen Anggaran**

1. Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.

2. Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Manajemen Anggaran;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Manajemen Anggaran;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Manajemen Anggaran terhadap Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD bersama-sama dengan DPRD Provinsi;
  - d. melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka mempersiapkan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta menyiapkan data terkait dengan penyusunan DPA Lanjutan;
  - f. menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah serta investasi pemerintah daerah;
  - g. melaksanakan penelitian RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
  - h. melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - i. melaksanakan menyiapkan data lainnya guna keperluan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - j. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran.

#### **4. Bidang Akuntansi**

1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen

dan Evaluasi Pertanggungjawaban.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - f. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan Akuntansi Pelaporan;
  - d. menyusun rancangan perubahan kebijakan akuntansi pemerintah Daerah, Rancangan perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah serta rancangan kebijakan lain yang berkaitan dengan penguatan fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta

- melaksanakan sosialisasi;
- e. melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah baik Pendapatan, Belanja, Hutang, Piutang, Investasi dan lainnya atas Pelaksanaan APBD setiap bulan;
- f. melaksanakan rekonsiliasi dan atas semua bahan/ data yang terkait dengan akun Laporan Keuangan dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebelum Penyusunan Laporan;
- g. melaksanakan penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, Semesteran dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap akhir tahun;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada lembaga Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan Sistem Prosedur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- i. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan hasil koreksi audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

## **(2) Sub Bidang Akuntansi Manajemen**

1. Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi Manajemen.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi

Manajemen;

- c. melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan Pelaksanaan Akuntansi Manajemen serta Pelaksanaan APBD Provinsi bersama dengan DPRD;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- e. melaksanakan penyiapan data pembukuan Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran termasuk Badan Layanan Umum Daerah secara berkala sebagai bahan Penyusunan Laporan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan meminta Laporan Keuangan setiap akhir tahun sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Kepegawaian, pembayaran gaji serta berkoordinasi dengan BKD, Perangkat Daerah dan Bidang Perbendaharaan;
- h. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Aset tetap dan persediaan secara berkala dan berkoordinasi dengan Bidang Aset sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. menyiapkan data capaian kinerja dan indikator Pembangunan, pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah serta lembaga lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pembinaan tentang Akuntansi Manajemen atas Pelaksanaan APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Akuntansi Manajemen.

## 5. Bidang Perbendaharaan

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

### (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Belanja Tidak Langsung dengan pihak dan unit kerja/ Instansi terkait;
- d. melaksanakan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas Belanja Tidak Langsung;
- e. melakukan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. melakukan administrasi penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

## **(2) Sub Bidang Belanja Langsung**

1. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Belanja Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja langsung;
  - b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
  - c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait;

- d. melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- e. melakukan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas belanja langsung;
- f. melakukan administrasi penerbitan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D);
- g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Langsung;

## **6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah**

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.
2. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - b. menghimpun Peraturan Perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Perencanaan Dan Penatusahaan Aset Daerah dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait antara lain penyusunan kebutuhan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah, penetapan status Barang Milik Daerah;
  - d. melaksanakan mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
  - e. melaksanakan Proses administrasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
  - f. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, dan

- menyusun Laporan mutasi barang, Laporan persediaan barang, Laporan hasil pengadaan barang dan Laporan hasil pemeliharaan barang;
- g. melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan Laporan mutasi barang;
  - h. melakukan bimbingan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - i. melaksanakan pembinaan kabupaten/kota;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

**(2) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah**

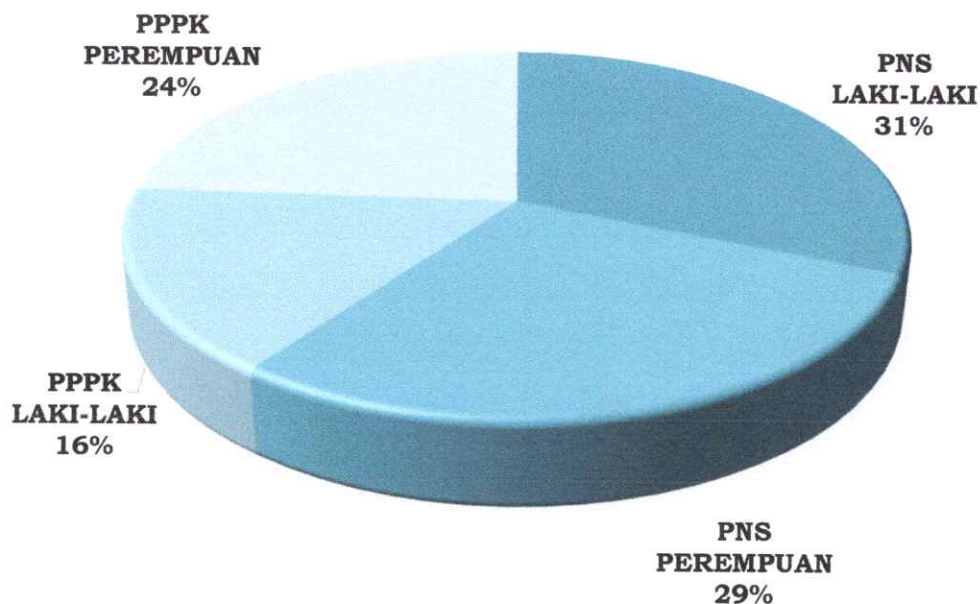
- 1. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- 2. Uraian tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
  - d. menghimpun bahan dan data, menganalisa serta menyelenggarakan kegiatan koordinasi penghapusan/ perubahan status hukum Aset Daerah;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
  - f. melakukan Pembinaan Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
  - g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.

### 1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

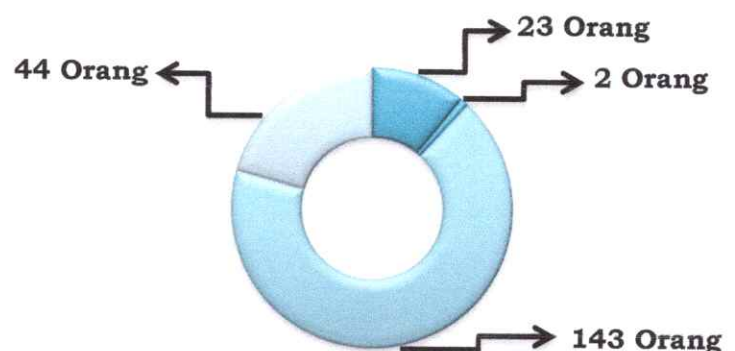
Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 212 orang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya mengenai Sumber daya Aparatur dapat dilihat pada Diagram berikut :

**Diagram / Tabel 1.1  
REKAP PEGAWAI PER JENIS KELAMIN**



JUMLAH ASN BPKAD	
PNS Laki - Laki	66
PNS Perempuan	61
PPPK Laki-Laki	34
PPPK Perempuan	51
<b>JUMLAH</b>	<b>212</b>

**ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN**



■ SMA/SMK ■ D3 ■ S1 ■ S2

Sumber : TU per 31 desember 2025

### 1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana bagi aparatur BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

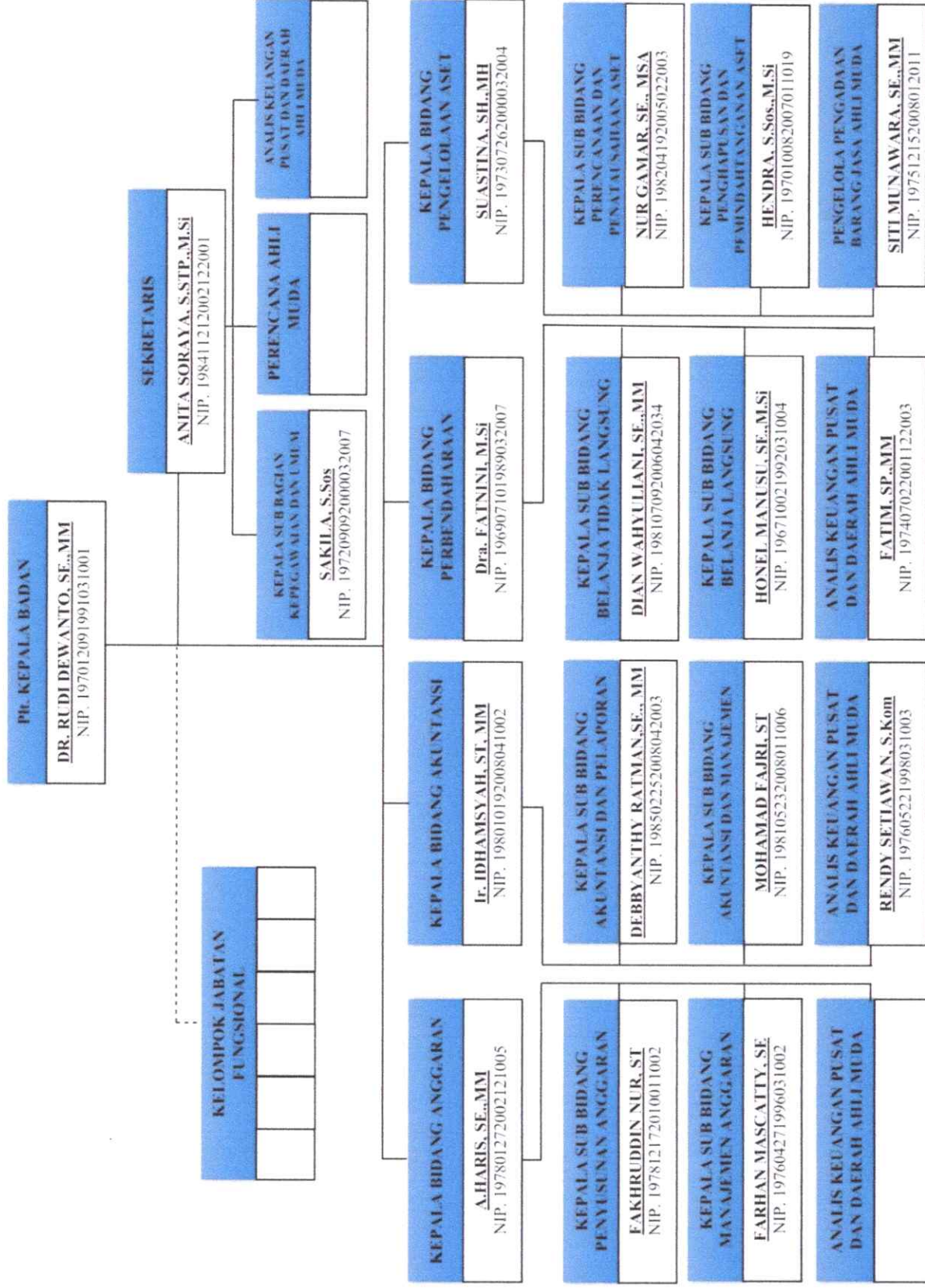
**Tabel 1.2**  
**Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2025**

<b>KODE</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
1.3	<b>ASET TETAP</b>	<b>52.909.766.340,57</b>
1	<b>TANAH</b>	<b>5.723.405.406,17</b>
1.01	TANAH	5.723.405.406,17
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>24.727.699.958,34</b>
2.01	ALAT BESAR	183.306.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	10.747.243.501,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	151.898.904,10
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.710.758.384,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	989.381.794,24
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	47.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	75.925.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	43.219.300,00
2.10	KOMPUTER	7.744.507.075,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	13.000.000,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	21.460.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
<b>KODE</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>

<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>20.219.820.995,05</b>
3.01	BANGUNAN GEDUNG	19.853.636.995,05
3.02	MONUMEN	168.907.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	197.277.000,00
<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>1.396.636.148,01</b>
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	645.128.574,01
4.02	BANGUNAN AIR	242.993.674,00
4.03	INSTALASI	416.693.900,00
4.04	JARINGAN	91.820.000,00
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>743.331.305,00</b>
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	743.331.305,00
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>98.872.528,00</b>
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	98.872.528,00
1.5	ASET LAINNYA	37.576.853.650,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	2.879.730.000,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	2.879.730.000,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	21.545.895.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	21.545.895.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	13.151.228.650,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	13.151.228.650,00

Sumber : Rekapitulasi data aset BPKAD

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



### 1.3 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Aspek strategis merupakan hal penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Eksistensi sebuah perangkat daerah bergantung sejauh mana perangkat daerah tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon aspek-aspek strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Aspek strategis yang dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Selain aspek strategis, dalam mengemban tugas dan menjalankan fungsi pelayanannya, BPKAD dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 1.3**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Rumusan Isu
Sumber Daya Manusia	Masih terbatasnya pegawai yang memiliki kapabilitas	Perkembangan teknologi, informasi dan aplikasi yang begitu cepat	Kebutuhan peningkatan kualitas SDM BPKAD yang adaptif terhadap teknologi dan mampu mengelola keuangan serta aset daerah secara profesional dan akuntabel
Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai, ruang kerja terbatas	Kapasitas gedung kantor tidak sesuai dengan jumlah pegawai	Modernisasi dan pengembangan sarana serta ruang kerja yang memadai sesuai kebutuhan organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan

			pelayanan BPKAD
Tindak Lanjut Temuan Audit	Percepatan tindak lanjut serta penyelesaian hasil temuan pemeriksaan	Kurangnya perhatian dari pihak ketiga, perangkat daerah/stakeholder dalam penyelesaian tindak lanjut	Penguatan mekanisme koordinasi, pengawasan, dan percepatan penyelesaian temuan audit baik internal maupun eksternal yang berdampak pada akuntabilitas keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah	Lambatnya proses pengelolaan keuangan daerah	Perubahan regulasi dan kebijakan	Percepatan adaptasi regulasi dan kebijakan baru serta optimalisasi proses pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi dan perbaikan sistem perencanaan
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan masing-masing perangkat daerah belum akuntabel dan tepat waktu	Kurangnya pemahaman pengelola laporan keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Peningkatan pemahaman dan kapasitas pengelola laporan keuangan perangkat daerah untuk menyusun laporan yang berkualitas dan tepat waktu
Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	Sistem informasi pengelolaan keuangan dan Barang MD belum terintegrasi	Modul BMD belum terintegrasi ke perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban	Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan BMD
Koordinasi Pengelolaan BMD	Koordinasi pengelolaan BMD dengan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal	Inventarisasi dan pengamanan BMD tetap belum maksimal, belum tertibnya pengamanan BMD, dokumen lahan belum lengkap	Penguatan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan BMD serta optimalisasi inventarisasi dan pengamanan aset dengan dokumen yang lengkap dan valid

Pada Bab II Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang berfokus pada realita capaian pembangunan serta kesenjangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Permasalahan ini diuraikan sebagai kondisi nyata yang menjadi hambatan atau tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah .

Secara khusus, dalam pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, permasalahan difokuskan pada aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Rumusan permasalahan ini berangkat dari kesenjangan antara capaian layanan dan tata kelola keuangan yang ada dengan standar pengelolaan yang ideal, sehingga memerlukan pembenahan terarah dan strategis.

Identifikasi permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menyusun kertas kerja yang memetakan isu-isu kunci serta memberikan gambaran terperinci mengenai tantangan yang harus dihadapi dan dikelola oleh BPKAD ke depan. Kertas kerja ini diharapkan menjadi alat bantu yang efektif dalam perencanaan program dan kebijakan serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Rumusan isu dan identifikasi permasalahan sesuai Bab II RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan BPKAD, berdasarkan rumusan kondisi nyata (realita) dari akar masalah dan kesenjangan capaian dengan kondisi ideal.

**TABEL 1.4**  
**EVALUASI AKIP TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN**  
**HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025**

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
1	Menyarankan kembali terhadap target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan check and review untuk memastikan dokumen yang disusun telah sesuai ketentuan	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah membuat Perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	-	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xZkQnt_gdNoZhxx1qhcYDI2ws-F12NVVW">https://drive.google.com/drive/folders/1xZkQnt_gdNoZhxx1qhcYDI2ws-F12NVVW</a>
2	Menyusun SOP/Pedoman teknis pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah akan membuat Pedoman Teknis Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah membuat Pedoman Teknis Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	-	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1z9dQ69y99gBnX-s1EN1erviucPvWQX34">https://drive.google.com/drive/folders/1z9dQ69y99gBnX-s1EN1erviucPvWQX34</a>
3	Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja internal dilakukan pada seluruh bidang secara berjenjang dan berkelanjutan dan pelaksanaan hasil evaluasi dituangkan pada laporan kinerja monitoring evaluasi triwulan disertakan berita acara, notulen, daftar hadir dan dokumentasi	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Evaluasi kinerja Internal secara berjenjang dan berkelanjutan	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah melaksanakan kegiatan yang dimaksud dari TW 1 sampai TW 4 tahun 2024	-	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1A16RpUViNlgMDgu5yLTRBOYWSM1igm3">https://drive.google.com/drive/folders/1A16RpUViNlgMDgu5yLTRBOYWSM1igm3</a>
4	Memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan Pengukuran Capaian Kinerja secara Digital Tahun 2025	Telah dilaksanakan	-	<a href="mailto:sister.bpkad.sultengprov.go.id">sister.bpkad.sultengprov.go.id</a>
5	Memastikan reward dan punishment yang diberikan relevan dan efektif dalam meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan pemberian punishment kepada pegawai	Untuk pemberian Reward akan dilaksanakan pada Tahun 2025	Karena terdapat Efisiensi Anggaran	



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH

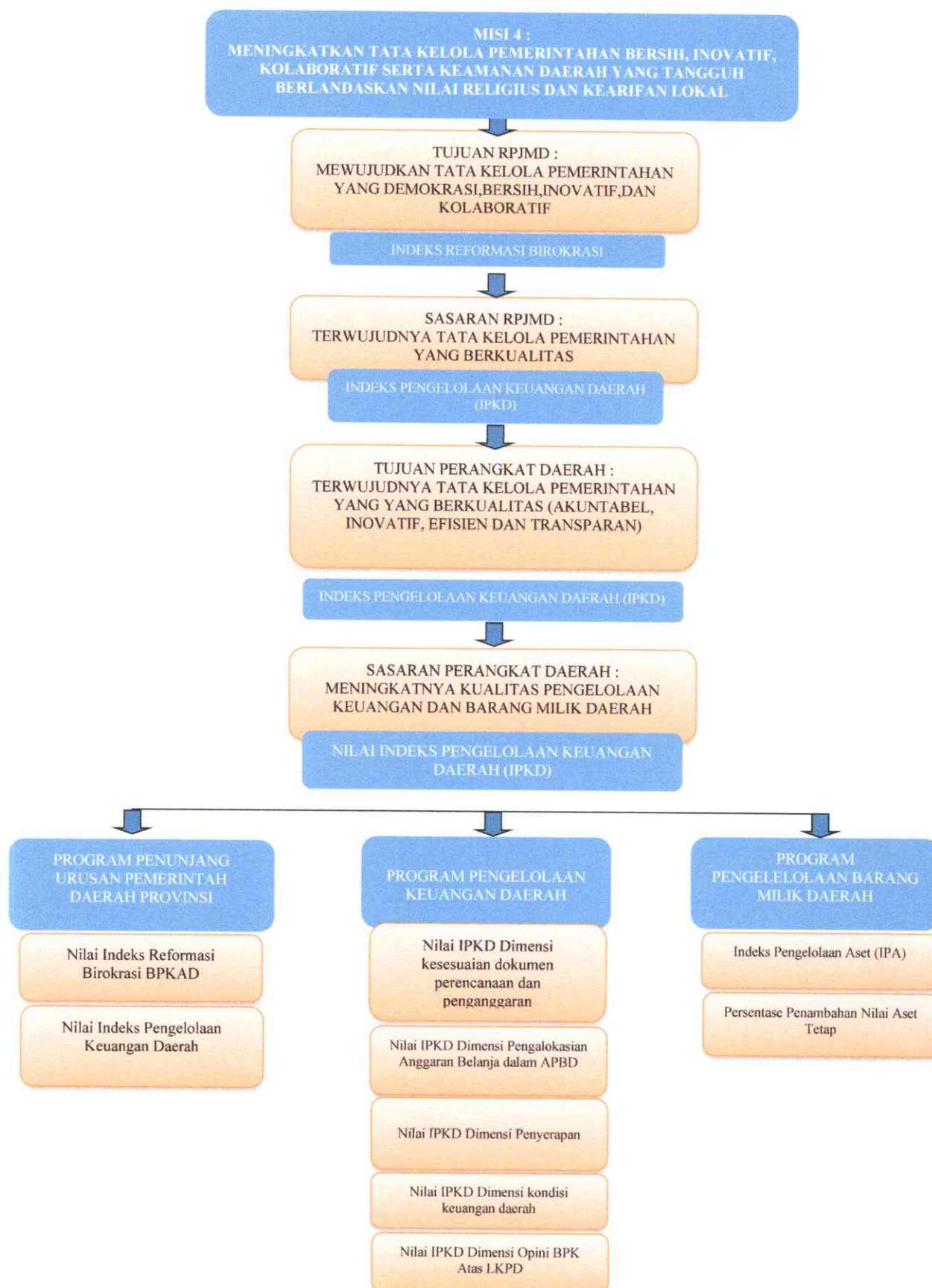
Cascading kinerja adalah menurunkan kinerja secara bertahap dan terbagi habis sampai dengan level paling bawah. Cascading kinerja disusun dengan tujuan agar organisasi mampu menyelaraskan kinerja organisasi terhadap kinerja unit kerja maupun kinerja individu dengan baik, memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, maupun individu, serta mampu mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efisien dan tepat guna.

Dalam mewujudkan misi Gubernur Tahun 2021-2026, maka BPKAD mengampu misi keempat yaitu mewujudkan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Bersih, Inovatif, Kolaboratif Serta Keamanan Daerah Yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius Dan Kearifan Lokal. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan) dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).***

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) serta Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

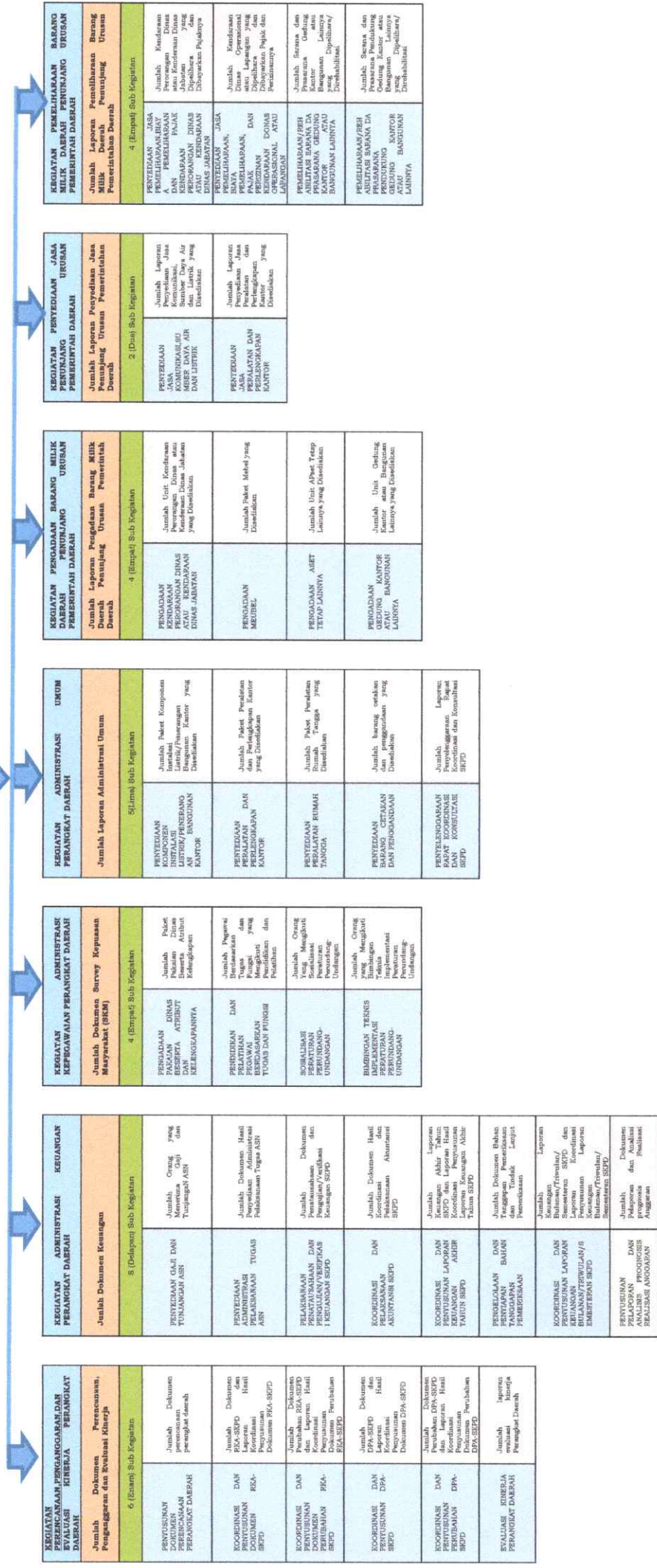
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

## BAGAN 2.1 CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



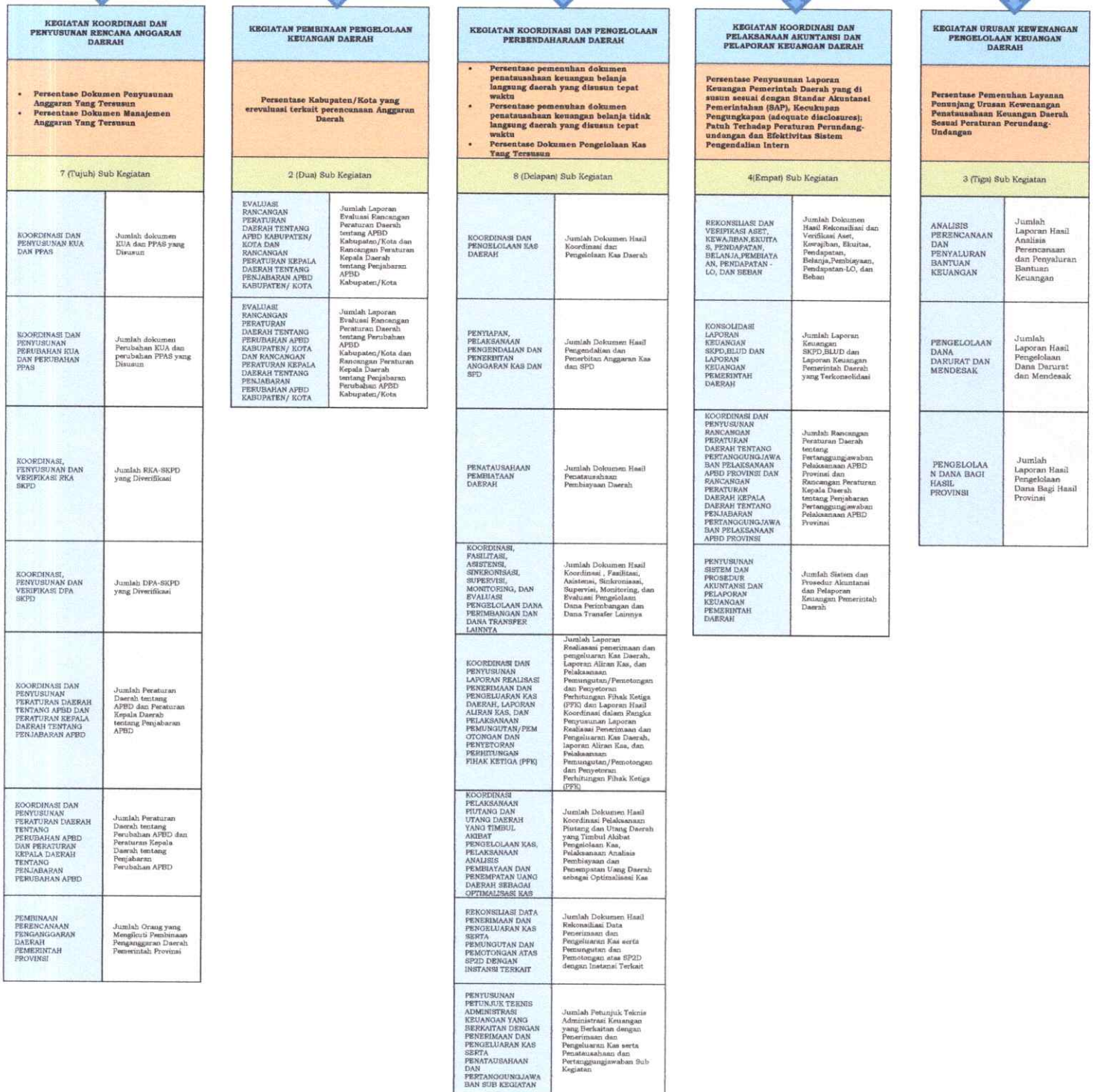
## PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD
- Nilai IPKD Dimensi Transparan Pengelolaan Keuangan Daerah



## PPROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
- Nilai IPKD Dimensi Penyerapan Anggaran
- Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah
- Nilai Dimensi Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD)



**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

- Indeks Pengelolaan Aset (IPA/IPBMD)
- Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

**KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

- Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun
- Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun
- Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun

11 (Sebelas) Sub Kegiatan

PENYUSUNAN STANDAR HARGA	Jumlah Standar Harga yang Disusun
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDATANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

## 2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari APBD terdiri 3 Program, 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Langsung Pencapaian Sasaran**

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	1.328.938.089.598,68	1.296.099.853.338,39	Berkurang
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	486.981.643.899,05	244.430.023.812,77	Berkurang
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	780.824.450,73	853.654.950,73	Bertambah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.891.450,73	171.644.950,73	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	56.301.000,00	54.488.000,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	67.950.000,00	46.700.000,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.350.000,00	57.100.000,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	48.850.000,00	48.850.000,00	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388.482.000,00	474.872.000,00	Bertambah
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	477.240.072.046,50	231.175.502.989,22	Berkurang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	476.211.478.196,50	230.418.345.139,22	Berkurang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305.640.000,00	341.690.000,00	Bertambah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.061.250,00	41.061.250,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.250.000,00	107.250.000,00	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	508.431.100,00	200.945.100,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.961.500,00	40.961.500,00	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.250.000,00	25.250.000,00	0
<b>4</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	127.361.966,00	120.261.966,00	Berkurang
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	56.327.050,00	57.467.050,00	Bertambah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.534.916,00	49.294.916,00	Berkurang
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	627.876.200,00	721.459.125,00	Bertambah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.951.150,00	102.701.150,00	Bertambah
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	62.976.500,00	43.756.500,00	Berkurang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.362.000,00	64.074.475,00	Berkurang
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	143.853.550,00	214.382.000,00	Bertambah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	293.733.000,00	296.545.000,00	Bertambah
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	850.170.560,65	1.315.690.082,32	Bertambah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.421.677,00	85.595.384,00	Bertambah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.914.400,00	181.911.050,00	Bertambah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.362.900,00	154.700.010,00	Bertambah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.079.583,65	222.066.638,32	Bertambah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.392.000,00	671.417.000,00	Bertambah
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	1.261.664.883,76	3.107.507.036,76	Bertambah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.000.000,00	201.455.200,00	Berkurang
	Pengadaan Mebel	26.247.600,00	179.179.800,00	Bertambah
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	601.099.545,00	2.202.843.256,00	Bertambah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	415.317.738,76	524.028.780,76	Bertambah
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4.597.363.754,50	4.532.880.498,00	Berkurang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.987.500,00	49.987.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.490.320.400,00	1.520.639.992,00	Bertambah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.793.600,00	427.313.600,00	Bertambah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.813.262.254,50	2.534.939.406,00	Berkurang
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.496.310.036,91	2.603.067.164,74	Bertambah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902.870.000,00	1.061.550.000,00	Bertambah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.850.036,91	1.327.727.164,74	Bertambah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.590.000,00	213.790.000,00	Bertambah

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	838.144.445.699,62	1.035.297.949.655,62	Bertambah
10	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	4.146.909.025,00	5.413.746.225,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	504.006.250,00	535.313.150,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	245.383.600,00	352.745.600,00	Bertambah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	462.633.900,00	475.415.150,00	Bertambah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	173.858.225,00	133.388.225,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.667.834.800,00	1.817.831.100,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	334.250.875,00	711.859.625,00	Bertambah
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	758.941.375,00	1.387.193.375,00	Bertambah
11	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	726.252.382,00	1.048.726.182,00	Bertambah
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	508.368.375,00	804.212.575,00	Bertambah
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	217.884.007,00	244.513.607,00	Bertambah
12	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	3.763.701.557,00	4.749.618.557,00	Bertambah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	288.314.450,00	422.507.425,00	Bertambah
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	492.318.490,00	492.994.980,00	Bertambah
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	595.893.410,00	680.670.410,00	Bertambah
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	439.162.642,00	869.413.637,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	298.126.800,00	226.103.400,00	Berkurang
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	269.644.550,00	137.984.550,00	Berkurang
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	585.633.450,00	925.566.450,00	Bertambah
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	794.607.765,00	994.377.705,00	Bertambah
13	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	4.257.582.741,00	4.583.416.241,00	Bertambah

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	947.765.250,00	1.044.045.000,00	Bertambah
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.257.720.500,00	1.309.048.650,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.035.622.118,00	1.142.201.368,00	Bertambah
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.016.474.873,00	1.088.121.223,00	Bertambah
<b>14</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>825.249.999.994,62</b>	<b>1.019.502.442.450,62</b>	<b>Bertambah</b>
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.250.000.000,00	19.150.000.000,00	Bertambah
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.500.000.000,00	500.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	806.499.999.994,62	999.852.442.450,62	Bertambah
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.812.000.000,00</b>	<b>16.371.879.870,00</b>	<b>Bertambah</b>
<b>15</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.812.000.000,00</b>	<b>16.371.879.870,00</b>	<b>Bertambah</b>
	Penyusunan Standar Harga	164.914.850,00	174.969.550,00	Bertambah
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	106.592.700,00	151.152.200,00	Bertambah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.259.149.350,00	1.266.443.150,00	Bertambah
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	218.108.300,00	11.865.996.870,00	Bertambah
	Pengamanan Barang Milik Daerah	715.432.950,00	1.186.273.100,00	Bertambah
	Penilaian Barang Milik Daerah	412.105.600,00	690.696.400,00	Bertambah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	236.578.450,00	355.227.200,00	Bertambah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	217.425.550,00	289.343.600,00	Bertambah
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	276.225.500,00	120.318.800,00	Berkurang
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	205.466.750,00	271.459.000,00	Bertambah

Sumber : Data Capaian Kinerja dan RKPD 2025

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
( Renstra 2021-2026)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup 6 dimensi yaitu : a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran b. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD c. Transparansi Pengelolaan d. Penyerapan Anggaran e. Kondisi Keuangan Daerah f. Opini BPK atas LKPD	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> <li>• Bid. Anggaran</li> <li>• Bid. Perbendaharaan</li> <li>• Bid. Akuntansi</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel 2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif 4. Administrasi BMD yang Andal	Kementerian Dalam Negeri	Bid. Aset
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	3. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK adalah pernyataan pemeriksa BPK tentang kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan. Penentuan opini didasarkan pada 4 kriteria yaitu : a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. Kecukupan pengungkapan informasi; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektifitas system pengendalian intern	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Semua Bidang

Sumber : IKU Kepala BPKAD 2021-2026

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
( Renstra 2025-2029)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup 6 dimensi yaitu : g. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran h. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD i. Transparansi Pengelolaan j. Penyerapan Anggaran k. Kondisi Keuangan Daerah l. Opini BPK atas LKPD	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> <li>• Bid. Anggaran</li> <li>• Bid. Perbendaharaan</li> <li>• Bid. Akuntansi</li> </ul>

Sumber : IKU Kepala BPKAD 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas 2.3 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2021-2026 dibuat dengan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan pada tabel 2.4 Perubahan Renstra 2025-2029 Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi 1 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan atau alat ukur objektif yang digunakan oleh instansi pemerintah dan organisasi untuk menilai sejauh mana target strategis telah tercapai dalam periode tertentu. Setiap akhir tahun, pencapaian IKU akan dilaporkan dalam **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**. Hasil ini akan menentukan nilai **SAKIP** (*Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*) yang menjadi cerminan efisiensi birokrasi pada Opd tersebut.

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Tahun 2025:



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	3,03

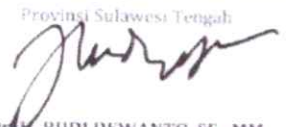
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 486.981.643.899,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 838.144.445.699,00	
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.812.000.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.328.938.089.598,00</b>	

Gubernur Sulawesi Tengah



**H. RUSDY MASTURA**

Palu, 30 Januari 2025  
Plt. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR HAFID  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


PIHAK KEDUA,

ANWAR HAFID  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

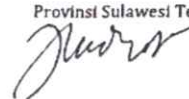
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 244.430.023.812,77	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.035.297.949.655,62	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 16.371.879.870,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.296.099.853.338,39</b>	

Gubernur Sulawesi Tengah



Palu, 11 Desember 2025  
Pit. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701209 199103 1 001



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Penyajian akuntabilitas kinerja ini dilakukan melalui penilaian, pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan perubahan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sehingga berdampak pada perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029.

Kinerja organisasi diukur melalui indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang diperjanjikan. Hasil pengukuran selanjutnya dianalisis untuk menilai tingkat pencapaian target, tren capaian antar tahun, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyajian Bab ini, diharapkan diperoleh gambaran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disusun analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dan realisasi kinerja (performance result) untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian target serta kesenjangan kinerja (performance gap) yang terjadi. Sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, analisis capaian kinerja dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- a. membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis;
- d. membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi nasional atau daerah lain yang relevan;
- e. menganalisis faktor penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif langkah perbaikan; dan
- f. menganalisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sehubungan dengan adanya periode transisi perencanaan strategis pada Tahun 2025, analisis capaian kinerja disajikan dalam dua bagian, yaitu analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2021–2026 dan analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2025–2029.

#### **A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI**

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis di Provinsi Sulawesi Tengah seiring dengan penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sebagai pengganti RPJMD Tahun 2021–2026. Perubahan dokumen perencanaan strategis tersebut berdampak pada penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 3.1** Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
(Renstra 2021–2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Tahun
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32	75,037	96,23%	Perlu Perbaiki	Tahun Ukur 2025
2.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,13	Baik	-	-	Tahun Ukur 2026
3.	Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	Tahun Audit 2025

Sumber : Hasil olah data

**TABEL 3.2** Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
(Renstra 2025–2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Tahun
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32	75,037	96,23%	Perlu Perbaiki	Tahun Ukur 2025

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD**

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target IPKD antara lain:

- Prioritas yang Berubah:  
Pergeseran prioritas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan mandatory spending dan pemenuhan SPM kebutuhan atau peraturan yang berlaku dapat menurunkan nilai.
- Ketidakseimbangan Belanja:  
Alokasi belanja yang timpang antara belanja operasional dan belanja modal, yang tidak mendukung pembangunan daerah secara efektif.

#### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Skor transparansi dapat turun jika akses informasi publik terhadap dokumen keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan, dan informasi pengadaan barang/jasa, kurang optimal atau tidak tersedia secara mudah di situs web resmi.

**1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** adalah alat ukur yang ditetapkan berdasarkan peraturan Kemendagri (*Permendagri Nomor 19 Tahun 2020*) untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara sederhana, IPKD bekerja dengan cara menginput dokumen keuangan daerah dan Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan 6 dimensi pada IPKD.

Berikut adalah mekanisme cara kerja IPKD:

1. Enam Dimensi Pengukuran (Komponen Penilaian) Pengukuran IPKD tidak hanya melihat satu sisi, melainkan enam dimensi utama:
  - Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran: Apakah APBD sejalan dengan dokumen rencana pembangunan (RKPD/RPJMD).
  - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD: Fokus belanja pada sektor produktif/pelayanan publik.
  - Transparansi pengelolaan keuangan daerah: Ketersediaan informasi keuangan untuk publik.
  - Penyerapan anggaran: Efisiensi penggunaan anggaran sepanjang tahun anggaran.
  - Kondisi keuangan daerah: Kesehatan fiskal daerah.
  - Opini BPK RI: Laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.
2. Mekanisme Pengukuran dan Penilaian
  - Penginputan Data: Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melakukan input data keuangan ke dalam sistem/aplikasi yang disediakan oleh BSKDN Kemendagri.
  - Verifikasi: Kemendagri melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diunggah.
  - Pembobotan: Setiap dimensi memiliki bobot tertentu (total 100%) untuk menentukan skor akhir.
3. Pemingkatan Hasil

Berdasarkan nilai yang diperoleh, pemerintah daerah akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori (berdasarkan pedoman terbaru):

  - Kategori A (Baik): Nilai 81-100.
  - Kategori B (Perlu Perbaikan/Cukup Baik): Nilai 51-80.
  - Kategori C (Sangat Perlu Perbaikan/Kurang Baik): Nilai 50 kebawah
4. Tujuan IPKD
  - Peningkatan Kinerja: Mendorong daerah memperbaiki tata kelola keuangannya agar lebih efisien.

- Evaluasi: Memberikan gambaran seberapa baik keuangan daerah dikelola.
- Pembinaan: Membantu Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan.

pada indikator IPKD terdapat 4 Program yang mempengaruhi pencapaian program tersebut adalah.

- a. Program penunjang urusan pemerintahan pada program ini yang menjadi pendukung IPKD adalah Administrasi Kepegawaian pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan karena kegiatan ini terkait dengan tata cara penginputan IPKD pada aplikasi. Hal ini sangat berpengaruh juga terhadap inputan, apabila kita tidak paham tata cara penginputan maka dapat dipastikan akan mengalami kegagalan atau hambatan. Karena dalam penginputan banyak sekali template perhitungan anggaran yang harus dibuat.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada program ini yang menjadi pendukung ipkd adalah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pada kegiatan ini berkaitan dengan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan OPini BPK.

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini dituntut kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS , KUAPPAS dan APBD. Kendala yang dihadapi adalah, seringkali program antara RKPD dan KUAPPAS berbeda anggaran programnya, maka pada program yang tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS tidak mendapatkan nilai atau point, begitupun juga dengan KUAPPAS dan APBD, apabila anggaran program tidak sesuai dengan KUAPPAS dan APBD maka tidak akan mendapatkan nilai. Akan tetapi apabila sesuai maka akan mendapatkan poin 1 di tiap program yang sesuai.

- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berkaitan dengan pemenuhan mandatory pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan Alokasi infrastruktur sebesar 40 % dan pemerintah Sulawesi

Tengah hanya mengalokasikan sebesar 26,2%. Selain itu Tidak terpenuhinya alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan Minat, bakat dan kreativitas siswa, SPM Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi dan terkait dengan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana

- Penyerapan Anggaran

Pada Dimensi ini, Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah mendapatkan skor maksimal dengan pemenuhan penyerapan anggaran sebesar 80%

- Kondisi Keuangan Daerah

Pada dimensi ini mengalami kendala terkait dengan kemandirian fiskal karena dana transfer pemerintah provinsi Sulawesi Tengah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Opini BPK atas LKPD

Pada dimensi ini pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sudah ,mendapatkan skor maksimal dengan ukuran telah mendapatkan opini WTP secara 3 Tahun berturut-turut.

**2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) IPBMD** adalah alat ukur kinerja yang menilai kualitas pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik Negara/Daerah atau BMN/BMD) secara komprehensif, seperti akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas pengawasan, dan keandalan administrasi, yang diukur dalam skala nilai (seringkali skala 4) sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

Definisi & Tujuan:

- Alat Ukur Kualitas: IPA berfungsi seperti nilai Indeks Prestasi (IP) atau hasil pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pengawasan dan pengendalian BMD.
- Bagian Reformasi Birokrasi: Ini menjadi komponen penilaian kinerja dalam program reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan digital.
- Pencegahan Korupsi: Peningkatan IPA diharapkan menurunkan risiko korupsi dan penyalahgunaan aset pemerintah.

Parameter Pengukuran:

Penilaian IPA didasarkan pada empat sasaran strategis utama, yaitu:

1. Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif: Memastikan aset digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan terhadap regulasi pengelolaan aset.
3. Pengawasan dan Pengendalian Efektif: Kemampuan melakukan pengawasan yang kuat.
4. Administrasi yang Andal: Keandalan sistem administrasi aset.

**3. Opini Bpk Terdapat LKPD,** Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas disajikan secara wajar. Opini ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan LKPD ini menggunakan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan kriteria dalam pemberian opini BPK berdasarkan:

- A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- B. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures)
- C. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan
- D. Efektifitas sistem pengendalian intern (SPI)

**B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERAPA TAHUN TERAKHIR;**

Sebagai bahan perbandingan Realisasi Kinerja pada indikator dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini :

**TABEL 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025  
(Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	77,593	Perlu Perbaikan	78,32	75,037	96,23%
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	-	-	-	2,13	2.85	Baik
3	Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Sumber : Hasil olah data

**TABEL 3.4** Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025  
(Renstra 2025–2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	77,593	Perlu Perbaikan	78,32	75,037	96,23%

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan Tabel 3.4 dapat kita lihat Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun lalu dan berapa tahun terakhir sebagai berikut :

1. IPKD Pada tahun Ukur 2024 realisasi kinerja berada di Angka 77,593 dengan capaian di nilai B (perlu perbaikan). Berdasarkan target pada tahun ukur 2024 untuk capaian kinerjanya tercapai 100%. Sedangkan pada tahun ukur 2025 target kinerjanya B dan hasil yang dicapai juga B artinya untuk target tahun 2025 yang tercapai 100% capaian kinerjanya. Akan tetapi apabila kita melihat angka realisasi kinerja untuk tahun ukur 2024 dan tahun ukur 2025 mengalami penurunan angka dari 77,593 untuk tahun ukur 2024 dan 75,037 untuk tahun ukur 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan pada halaman 40.

Untuk LPKD tahun ukur 2024 ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan LPKD dari tahun ukur 2023 adalah:

- a. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang hampir sesuai dengan mandatory spending terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
  - b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan yang dibuktikan dengan tersedianya data pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yang dapat diakses melalui website pemerintah Sulteng.
2. IPA/IPBMD

Untuk realisasi kinerja capaian kinerja IPA/IPBMD belum dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penilaian dan penginputan data IPA/IPBMD baru dilakukan pada tahun 2025 yang akan di evaluasi pada tahun 2026.

3. Opini BPK Terhadap LKPD

Untuk opini BPK terhadap LKPD dapat dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerjanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 opini BPK yang di capaian adalah WTP terhadap LKPD tahun anggaran 2023, begitu dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025. Pemerintah Sulteng mendapatkan opini BPK WTP terhadap LKPD tahun anggaran 2024.

Realisasi Kinerja pada indikator pertama yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**DIAGRAM 3.1** Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun









Sumber : Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi, Kabupaten, Kota se-Sulawesi Tengah

Berdasarkan Diagram diatas, Hasil pengukuran IPKD Prov. Sulteng TA 2021-2023 menunjukkan bahwa terus ada peningkatan dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit penurunan pada TA 2024 yaitu sebesar 3%. Penurunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat disebabkan oleh :

1. Adanya penambahan kriteria penilaian bagi alokasi belanja pemenuhan SPM pada Dimensi 2

2. Adanya Perubahan Mandatory Spending alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dari 25% menjadi 40% diluar DBH dan Dana Transfer kepada Kabupaten/Kota.
3. Terjadi perubahan pembobotan pada dimensi 6, dimensi 3 dan dimensi 5
4. Perubahan pengkategorian hasil pengukuran IPKD dari metode Baik (81-100), Perlu Perbaikan (51-80), Sangat Perlu Perbaikan (kurang dari 51)

**Tabel 3.5** Capaian Ipkd Perdimensi

DIMENSI	TAHUN UKUR 2024	TAHUN UKUR 2025
D.1 KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	8,928	 10,704
D.2 PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DALAM APBD	19,643	 14,146
D.3 TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,741	 12,188
D.4 PENYERAPAN ANGGARAN	15	 20
D.5 KONDISI KEUANGAN DAERAH	4,281	 8
D.6 OPINI BPK ATAS LKPD	15	 10
<b>TOTAL</b>	<b>77,593</b>	<b>75,037</b>
<b>PERINGKAT</b>	<b>Perlu Perbaikan</b>	<b>Perlu Perbaikan</b>

Sumber : Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi, Kabupaten, Kota se-Sulawesi Tengah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

## D2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Faktor yang mempengaruhi dimensi ini antara lain:

- Prioritas yang Berubah:  
Pergeseran prioritas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan mandatory spending dan pemenuhan SPM kebutuhan atau peraturan yang berlaku dapat menurunkan nilai.
- Ketidakseimbangan Belanja:  
Alokasi belanja yang timpang antara belanja operasional dan belanja modal, yang tidak mendukung pembangunan daerah secara efektif.

### D3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Skor transparansi dapat turun jika akses informasi publik terhadap dokumen keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan, dan informasi pengadaan barang/jasa, kurang optimal atau tidak tersedia secara mudah di situs web resmi.

3. **INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)** adalah alat ukur kinerja yang menilai kualitas pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik Negara/Daerah atau BMN/BMD) secara komprehensif, seperti akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas pengawasan, dan keandalan administrasi, yang diukur dalam skala nilai (seringkali skala 4) sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

**TABEL 3.6** Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun  
**HASIL PENGUKURAN IPA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
		TAHUN UKUR 2024		TAHUN UKUR 2025		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,13	2,85	-	-	Baik

Sumber : perhitungan indeks pengelolaan aset (IPA)

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ukur 2024 sebesar 2,85 lebih tinggi 0,72 dari indeks yang menjadi target yakni 2,13.

Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat BUMD, BLUD dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hasil penilaian tersebut disampaikan oleh kemendagri melalui hasil verifikasi dan disampaikan melalui Zoom Meeting. Sedangkan untuk tahun ukur 2025 tidak dilaksanakan pengukuran IPA(IPBMD). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan masa transisi penilaian IPA/IPBMD. Kemendagri masih menyusun keputusan mendagri (KEPMEN) terkait tata cara penilaian IPA/IPBMD

Parameter Pengukuran:

Penilaian IPA didasarkan pada empat sasaran strategis utama, yaitu:

- Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif: Memastikan aset digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal.
  - Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan terhadap regulasi pengelolaan aset.
  - Pengawasan dan Pengendalian Efektif: Kemampuan melakukan pengawasan yang kuat.
  - Administrasi yang Andal: Keandalan sistem administrasi aset.
3. **Opini BPK Terhadap LKPD** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah di wilayahnya secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menandakan pengelolaan keuangan yang baik, meskipun seringkali disertai temuan perbaikan seperti kelemahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, atau pertanggungjawaban, terutama di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sulteng sendiri telah meraih WTP berkali-kali, menunjukkan komitmen akuntabilitas keuangan daerahnya.

**TABEL 3.7** Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun  
**HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	TARGET KINERJA								KET
		2022		2023		2024		2025		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah untuk Tahun 2022 dan 2023 memperoleh opini WTP sesuai dengan target 100%, serta untuk Tahun 2024 dan 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Untuk Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

**C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA;**

Renstra (Rencana Strategis) yang mengalami perubahan pada Indikator Kinerja yang menandakan arah tujuan organisasi selama periode perencanaan, dari Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029. Meskipun Renstra bersifat dinamis dan dapat disesuaikan saat ada perubahan kebijakan dapat menunjukkan target serta visi-misi masih relevan dan sesuai dengan RPJMD.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 dan Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengetahui posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap target akhir periode Tingkat kemajuan capaian kinerja dihitung sebagai rasio antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 3.8 dan 3.9 berikut.

**TABEL 3.8** Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra (Renstra 2021–2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75.037	81,02	92,7 %
2.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2.85	3,28	86,9 %
3.	Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%

Sumber : hasil olah data

**TABEL 3.9** Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra (Renstra 2025–2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75,037	81,02	92,7 %

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.8 dan 3.9 diatas Pada Indikator pertama Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 mendapatkan realisasi sebesar 75,037 dengan target akhir renstra cukup baik. Pengukuran dan penilaian IPKD berdasarkan 6 dimensi akan kembali dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan formulasi terbaru.

Pada indikator IPKD dapat kita lihat Tingkat kemajuan antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra di tahun 2029 sebesar 92,7%. Untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa hal yang perlu dilakukan bukan hanya oleh BPKAD sebagai penanggung jawab akan tetapi perlu juga komitmen kuat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada semua lini. Untuk mencapai tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pagu program pada Pembahasan RKPD dan KUAPPAS harus sesuai atau sama
- b. Pagu program pada Pembahasan KUAPPAS dan APBD harus sesuai atau sama
- c. Pengalokasian anggaran harus memehuni mandatory spending dan pemenuhan SPM yang telah disyaratkan beserta output dan capaiannya
- d. Akses informasi terhadap dokumen keuangan daerah harus dipublikasikan do website pemerintah provinsi sulaweis Tengah paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya dokumen yang disyaratkan
- e. Penyerapan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi tengah harus mencapai minimal 80%

- f. Kondisi Keuangan daerah yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, akan tetapi bergantung pada PAD

Kemudian pada indikator 2, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengalami peningkatan realisasi sebesar 2.85 dari target sebelumnya 2.13 dengan target akhir renstra cukup baik, Pengukuran dan penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun 2026 menunggu hasil dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian pada indikator 3 yaitu Opini WTP menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah, pada Realisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan target akhir Renstra 100% untuk dokumen LKPD Tahun 2024 dan Tahun audit 2025. Opini BPK terhadap LKPD harus WTP di tiap tahunnya

#### D. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

**TABEL 3.10**

**Hasil dan Peringkat IPKD Tahun Ukur 2025**

Berdasarkan SK Mendagri Pemerintah Provinsi daerah Sulawesi

NO	Pemerintah Provinsi	Predikat	Nilai IPKD Tahun 2024 (Tahun Ukur 2025)	Kategori
1.	Sulawesi Tenggara	A	82,990	Baik
2.	Sulawesi Selatan	B	78,321	Perlu Perbaikan
3.	Sulawesi Tengah	B	75,037	Perlu Perbaikan
4.	Sulawesi Utara	B	71,344	Perlu Perbaikan

Sumber : hasil olah data

Data IPKD yang mengukur kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) baru saja melewati tahap penginputan dan validasi oleh BSKDN Kemendagri pada akhir tahun 2025. Hasil peringkat akhir

untuk tahun ukur 2025 ini diumumkan secara resmi pada awal tahun 2026.

Untuk indikator IPKD Tahun ukur 2025 menggunakan Tahun anggaran 2024. Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan mengapa nilai Pemprov belum mencapai nilai baik, hal ini disebabkan oleh

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini dituntut kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS , KUAPPAS dan APBD. Kendala yang dihadapi adalah, seringkali program antara RKPD dan KUAPPAS berbeda anggaran programnya, maka pada program yang tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS tidak mendapatkan nilai atau point, begitupun juga dengan KUAPPAS dan APBD, apabila anggaran program tidak sesuai dengan KUAPPAS dan APBD maka tidak akan mendapatkan nilai. Akan tetapi apabila sesuai maka akan mendapatkan poin 1 ditiap program yang sesuai.

- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berkaitan dengan pemenuhan mandatory pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan Alokasi infrastruktur sebesar 40 % dan pemerintah Sulawesi Tengah hanya mengalokasikan sebesar 26,2%. Selain itu Tidak terpenuhinya alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan MInat, bakat dan kreartivitas siswa, SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi dan terkait dengan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana

- Kondisi Keuangan Daerah

Pada dimensi ini mengalami kendala terkait dengan kemandirian fiskal karena dana transfer pemerintah provinsi Sulawesi Tengah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bila disandingkan dengan Nilai IPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan predikat baik dengan nilai 82,990 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kesesuaian Dokumen perencanaan dan penganggaran hamper seluruhnya terpenuhi sehigga memberikan skor yang tinggi pada dimensi ini Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD hampir memenuhi mandatory spending sehingga pada dimensi ini memiliki skor yang tinggi hamper mencapai skor maksimal

- Transparansi Pengelolaan keuangan daerah hamper mendapatkan skor maksimal disebabkan karena hampir semua dokumen yang disyaratkan terpublikasi dengan jangka waktu paling lambat 30 hari setelah dikeluarkan
- Penyerapan Anggaran mendapatkan skor maksimal karena penyerapan anggaran mencapai minimal 80%
- Opini BPK terhadap LKPD mendapatkan skor maksimal karena telah mendapatkan opini BPK tiga tahun berturut-turut

Indeks Pengelolaan Aset (IPA), khususnya untuk Barang Milik Daerah (BMD), merupakan indikator kinerja yang relatif baru diimplementasikan dan terus mengalami penyesuaian, sehingga data historis perbandingan nasional yang konsisten masih terbatas.

**TABEL 3.11** Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi Lain

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional / Provinsi / Nama daerah lain	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Provinsi Jawa Barat	WTP 14 kali berturut-turut sejak 2010 s/d 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Provinsi Sulawesi Tengah	WTP 10 kali berturut-turut sejak 2014 s/d 2024
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Provinsi Sulawesi Utara	WTP 12 kali berturut-turut sejak 2012 s/d 2024

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Perbandingan WTP secara nasional penjelasannya sebagai berikut :

1. Pemerintah **Provinsi Jawa Barat** meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
2. Pemerintah **Provinsi Sulawesi Tengah** meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3. Pemerintah **Provinsi Sulawesi Utara** meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA**

Pencapaian Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah berjalan dengan baik. Capaian dalam Program-Program pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Adapun indikator kinerja Program kegiatan yaitu :

**TABEL 3.12**

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Program RPJMD (2025-2029)	Target 2025	Capaian 2025
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85	85
	Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	14,74	12,19
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Nilai)	8,93	10,7
	Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)	19,64	17,43
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Nilai)	15	20

	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)	4,28	8
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Nilai IPKD Dimensi Opini BPK Atas LKPD (Nilai)	15	10
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9,76	9,76
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) /Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)	2,13	2,13

Sumber : RPJMD 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan penyebab keberhasilan dan Kegagalan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan
  - a. Nilai Indeks RB pada tahun 2025 ditetapkan nilai indeks RB 85%, sedangkan realisasi hanya 43,27%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan penilaian terkait RB terdapat bukti dukung yang ditolak oleh aplikasi SPBE belum tersedia dokumen manajemen resiko SPBE dan peta rencana SPBE.
- 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Nilai IPKD Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan  
 Pada indikator Nilai Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan ditetapkan target dengan nilai 10,70 dan realisasinya adalah 10,70 artinya capaian kinerjanya tercapai 100%. Hal ini disebabkan oleh terdapat beberapa program yang sesuai antara Pagu dengan

KUAPPAS, dengan Pagu KUAPPAS dengan APBD. Walaupun memang belum mencapai angka maksimal pada dimensi ini.

b. Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja

Dalam APBD pada dimensi ini ditetapkan target dengan nilai 17,43 sedangkan realisasi hanya 14,146 dengan capaian 81,16. Hal ini disebabkan karena:

- Alokasi infrastruktur hanya sebesar 26.2% dari total belanja APBD, tidak mencapai 40%
- Tidak memenuhi keterpenuhan alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dan SPM Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
- Tidak memenuhi ketercapaian output atas target pada SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi
- Nilai IPKD Dimensi Transparansi  
Berdasarkan realisasi nilai IPKD Diskusi Transparansi didapatkan realisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan hampir terpenuhinya semua dokumen yang menjadi Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Nilai IPKD Dimensi Penyerapan.

Pada dimensi ini capaian yang didapatkan adalah 100% disebabkan karena realisasi yang didapat sesuai dengan yang ditargetkan yakni 20. Hal ini disebabkan karena semua belanja sudah memenuhi penyerapan anggaran minimal sebesar 80%.

d. Nilai dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Pada dimensi ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi nilai 8. Walaupun memang masih sangat jauh dari bobot maksimal sebesar 20. Hal ini berkaitan dengan kemandirian keuangan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.

e. Nilai Dimensi Opini BPK

Pada dimensi ini, capaian yang dihasilkan adalah 100% dengan realisasi mencapai target maksimal 10. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan opini BPK selama 3 tahun berturut-turut.

### 3. Program Pengelolaan BMD

- Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada indikator Indeks Pengelolaan Aset pada tahun 2025 belum dapat diukur disebabkan pada tahun 2025 belum dilakukan pengukuran IPA/IPBMD, pengukuran akan dilakukan tahun 2026.

Selain penjelasan diatas, pada tahun 2025 Bpkad diperhadapkan pada realisasi Anggaran yang tidak mencapai target, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat Efisiensi Anggaran dan Pengendalian belanja perangkat daerah pada TW IV Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan surat edaran Nomor 49 tahun 2025 sehingga setiap perangkat daerah harus melakukan evaluasi prioritas belanja dengan memprioritaskan realisasi belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat wajib, mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
2. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang hanya mencapai 62,34% hal ini disebabkan oleh penganggran PPPK yang sudah dianggarkan dari bulan maret akan tetapi terjadi penundaan pengangkatan PPPK yang semula bulan maret menjadi bulan juni.
3. Terdapat Realisasi dana bagi hasil Provinsi hanya sebesar 76,41% atau sekitar Rp. 763.978,286,04 dari anggaran sebesar Rp. 999,852,442.62,- hal ini disebabkan karena kurang salur Dana Bagi Hasil Tahun 2024 pada beberapa kabupaten belum disalurkan dan Dana Bagi Hasil (DBH) TW IV Tahun 2025 belum dilasalurkan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Belum disalurnya sebagian kurang salur Tahun 2024 dan TW IV Tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan dalam rangka menjaga keseimbangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Efisiensi sumber daya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terhadap penyerapan anggaran belanja dalam mengukur capaian kinerja sehingga pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa tercapai dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.13** Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	75,037	Cukup Baik	1.261.890.036.403,84	938.337.804.964,04	74,36%	25,64%
2	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,13	2.85	Baik	16.371.879.870,00	15.146.721.365,00	92,52%	7,48%
3	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	100%	100%	4.583.416.241,00	4.222.213.169,00	92,12%	7,88%

Sumber : Dokumen LRA BPKAD

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk indikator IPKD yang mencakup kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dapat di hitung Tingkat efisiensinya berdasarkan total anggaran dan realisasi anggaran, didapatkan hasil sebesar 25,64%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat efisiensi secara standar masuk pada kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikaitkan bahwa efisiensi dan target untuk IPKD harusnya tercapai akan tetapi untuk IPKD Tahun 2025 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa factor yang sdh dijelaskan di awal seperti adanya perubahan inddikator pengukuran dan perubahan skor pembobotan pada beberapa dimensi. Tidak terpenuhinya mandatory spending infrastruktur sebesar 40 %.
2. IPA/ IPBMD  
Untuk indikator IPA/IPBMD belum dapat diukur disebabkan karena pada Tahun 2025 Kementrian Dalam Negeri masih menyusun

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penilaian Indeks Pengelolaan Aset/ Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga untuk efisiensi Indikator tersebut belum dapat di hitung

3. Opini BPK terhadap LKPD

Untuk indikator opini BPK terhadap LKPD, mencakup kegiatan Koordiansi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat di hitung Tingkat efisiensinya berdasarkan total anggaran dan realisasi anggaran, didapatkan hasil sebesar 7,88%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat efisiensi secara standar masuk pada kategori sangat rendah yaitu dibawah 80%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikaitkan bahwa efisiensi dan target tetap tercapai walaupun terdapat efisiensi sebesar 7,88%. Hal ini ditandai dengan tercapainya target WTP pada tahun audit 2025

**G. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Pada tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 1 Program Penunjang dan 2 Program Prioritas serta 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

**TABEL 3.14** ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	BPKAD	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKAD, Meningkatkan Kualitas Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD, Nilai IPKD Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah	88,86 15	1.296.099.853.338,39 244.430.023.812,77	88,86 15	970.240.626.787,04 156.881.231.751,00	100%	74,86% 64,18%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan	1. Nilai SAKIP BPKAD 2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	87,91 100%	853.654.950,73	87,91 100%	789.599.929,00	100%	92,50%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersusunnya dokumen bukti dukung dalam E-Sakip Reviu (ESR) Kemenpan 2. Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 2	171.644.950,73	9 2	129.258.679,00	100%	75,31%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
		Bisnis							
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	54.488.000,00	1 Dok	46.268.247,00	100%	84,91%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	46.700.000,00	1 Dok	43.495.997,00	100%	93,14%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	57.100.000,00	1 Dok	56.579.097,00	100%	99,09%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	48.850.000,00	1	48.637.536,00	100%	99,57%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	474.872.000,00	7	465.360.373,00	100%	98,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	231.175.502.989,22	75	144.347.344.462,00	100%	62,44%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	230.418.345.139,22	100%	143.646.875.382,00	100%	62,34%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawaban BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	341.690.000,00	100%	336.680.596,00	100%	98,53%
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Akuntansi BPKAD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	41.061.250,00	1 Dok	40.481.415,00	100%	98,59%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	107.250.000,00	1	104.982.021,00	100%	97,89%
11	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	200.945.100,00	100%	153.670.410,00	100%	76,47%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	40.961.500,00	2	39.528.457,00	100%	96,50%
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25.250.000,00	1	25.126.181,00	100%	99,51%
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD yang Sesuai Ketentuan	100%	120.261.966,00	100%	87.320.577,00	100%	72,61%
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	13.500.000,00	2 Dok	13.432.998,00	100%	99,50%
16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	57.467.050,00	1 Dok	26.112.931,00	100%	45,44%
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	49.294.916,00	2 Dok	47.774.648,00	100%	96,92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD</b>  <b>2. Meningkatkan Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpublikasi</b>	<b>1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara BPKAD</b> <b>1. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK</b> <b>2. Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpublikasi</b>	65		65		100%	
				65	721.459.125,00	65	591.303.552,00	100%	81,96%
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terupdatanya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN BPKAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	102.701.150,00	100%	81.856.995,00	100%	79,70%
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	135	43.756.500,00	135	33.273.750,00	100%	76,04%
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	64.074.475,00	5	16.141.996,00	100%	25,19%
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	214.382.000,00	100	176.949.990,00	100%	82,54%
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang di publikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	296.545.000,00	29	283.080.821,00	100%	95,46%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada BPKAD</p>	<p>1. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI</p> <p>1. Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD</p> <p>2. Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor</p>	20 65 65%	1.315.690.082,32	20 65 65%	1.249.086.193,00	100%	94,94%
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	85.595.384,00	1	74.220.336,00	100%	86,71%
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	5	181.911.050,00	5	165.424.721,00	100%	90,94%
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	154.700.010,00	1	143.911.475,00	100%	93,03%
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersusunnya Produk Hukum (Pergub, PERDA, dll) BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	222.066.638,32	100%	216.820.048,00	100%	97,64%
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<p>1. Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI</p> <p>2. Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor di BPKAD</p>	<p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	1 100%	671.417.000,00	1 100%	648.709.613,00	100%	96,62%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BPKAD Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65	3.107.507.036,76	65	2.962.307.360,00	100%	95,33%
28	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	201.455.200,00	1	160.900.000,00	100%	79,87%
29	Pengadaan Mebel	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	179.179.800,00	1	162.714.900,00	100%	90,81%
30	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	2.202.843.256,00	1	2.119.258.260,00	100%	96,21%
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	524.028.780,76	1	519.434.200,00	100%	99,12%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD3. Meningkatnya Kematangannya SPBE BPKAD4. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi3. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada BPKAD4. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	6581,7	4.532.880.498,00	6581,7	4.306.520.674,00	100%	95,01%
				46565		46565			
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital BPKAD 2. Terkelolanya arsip statis BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90% 90%	49.987.500,00	90% 90%	46.095.725,00	100%	92,21%
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	1.520.639.992,00	2	1.452.846.413,00	100%	95,54%
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya data sektoral BPKAD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	427.313.600,00	1	397.146.286,00	100%	92,94%
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan BPKAD (SP, MP, dan laporan SKM) 2. Terukurinya SKM pada layanan BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	2.534.939.406,00	3	2.410.432.250,00	100%	95,09%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah Lingkup BPKAD	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	65%	2.603.067.164,74	65%	2.547.749.004,00	100%	97,87%
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	1.061.550.000,00	13	1.049.365.304,00	100%	98,85%
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.327.727.164,74	3	1.312.309.000,00	100%	98,84%
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	213.790.000,00	3	186.074.700,00	100%	87,04%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Meningkatnya Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD 2. Meningkatnya Kualitas Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	1. Nilai IPKD Dimensi Kualitas anggaran belanja dalam APBD 2. Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	19,800 19,8	1.035.297.949.655,62	19,800 19,8	798.212.673.671,04	100%	77,10%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<p>1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Anggaran</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p>	<p>1. Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun</p> <p>2. Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>5.413.746.225,00</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>5.309.767.905,00</p>	<p>100%</p>	<p>98,08%</p>
39	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<p>1. Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS</p> <p>2. Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK</p>	<p>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>535.313.150,00</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>525.293.368,00</p>	<p>100%</p>	<p>98,13%</p>
40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<p>Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</p>	<p>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun</p>	<p>2</p>	<p>352.745.600,00</p>	<p>2</p>	<p>344.006.582,00</p>	<p>100%</p>	<p>97,52%</p>
41	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	<p>Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</p>	<p>53</p>	<p>475.415.150,00</p>	<p>53</p>	<p>464.507.881,00</p>	<p>100%</p>	<p>97,71%</p>
42	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	<p>Terverifikasinya DPA - SKPD Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</p>	<p>53</p>	<p>133.388.225,00</p>	<p>53</p>	<p>133.383.719,00</p>	<p>100%</p>	<p>100,00 %</p>
43	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<p>Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD</p>	<p>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</p>	<p>2</p>	<p>1.817.831.100,00</p>	<p>2</p>	<p>1.798.771.175,00</p>	<p>100%</p>	<p>98,95%</p>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
44	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	711.859.625,00	2	697.993.780,00	100%	98,05%
45	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencanaan Penganggaran Daerah di Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	266	1.387.193.375,00	266	1.345.811.400,00	100%	97,02%
9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Meningkatnya Kualitas Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah</b>	100%	1.048.726.182,00	100%	1.034.766.226,00	100%	98,67%
46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13	804.212.575,00	13	795.557.675,00	100%	98,92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
47	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13	244.513.607,00	13	239.208.551,00	100%	97,83%
<b>10</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	1. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah2. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	1. Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu2. Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu3. Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100% 100% 100%	4.749.618.557,00	100% 100% 100%	4.517.135.085,00	100%	95,11%
48	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24	422.507.425,00	24	415.519.907,00	100%	98,35%
49	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya Penyediaan Dana APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	492.994.980,00	4	492.445.014,00	100%	99,89%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
50	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1. Tersusunnya Dokumen SP2D 2. Tersusunnya Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4	680.670.410,00	4	677.524.293,00	100%	99,54%
				12		12			
51	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Laporan Tepra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20	869.413.637,00	20	868.238.126,00	100%	99,86%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
52	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA2. Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22	226.103.400,00	22	211.895.257,00	100%	93,72%
53	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana 2. Pemerintah Daerah Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dengan Bidang Akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10 4	137.984.550,00	10 4	137.977.600,00	100%	99,99%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
54	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	17	925.566.450,00	17	910.715.841,00	100%	98,40%
55	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan ke Perangkat Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	994.377.705,00	100	802.819.047,00	100%	80,74%
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.019.502.442.450,62	100%	783.128.791.286,04	100%	76,81%
58	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	19.150.000.000,00	1	19.150.000.000,00	100%	100,00 %
59	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	500.000.000,00	1	-	100%	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
60	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	999.852.442.450,62	4	763.978.791.286,04	100%	76,41%
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures); Patuh Terhadap Peraturan	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures); Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas</b>	100%	4.583.416.241,00	100%	4.222.213.169,00	100%	92,12%
61	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	400	1.044.045.000,00	400	991.835.084,00	100%	95,00%
62	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82	1.309.048.650,00	82	1.165.792.478,00	100%	89,06%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
63	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	225	1.142.201.368,00	225	1.076.157.128,00	100%	94,22%
64	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	1.088.121.223,00	2	988.428.479,00	100%	90,84%
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>1. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) 2. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap</b>	2,76 100	16.371.879.870,00	2,76 100	15.146.721.365,00	100%	92,52%
13	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset 3. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Aset Daerah</b>	<b>1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun 2. Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun 3. Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun</b>	100% 100% 100%	16.371.879.870,00	100% 100% 100%	15.146.721.365,00	100%	92,52%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
67	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Buku Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	174.969.550,00	2	164.908.384,00	100%	94,25%
68	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PD (Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindatanganan dan Penghapusan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2	151.152.200,00	2	148.791.637,00	100%	98,44%
69	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	1.266.443.150,00	2	1.044.220.064,00	100%	82,45%
70	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	2	11.865.996.870,00	2	11.091.876.538,00	100%	93,48%
71	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	1.186.273.100,00	2	1.083.773.679,00	100%	91,36%
72	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemenuhan Dokumen Pemindatanganan BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	690.696.400,00	2	667.260.659,00	100%	96,61%
73	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42	355.227.200,00	42	325.496.621,00	100%	91,63%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
74	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Tersusunnya Dokumen Pemindatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2. Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 4	289.343.600,00	1 4	263.891.290,00	100%	91,20%
75	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	242	120.318.800,00	242	120.108.981,00	100%	99,83%
76	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Neraca BMD 2.Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Pendukung LK 3.Penilaian Pemanfaatan BMD di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 80 100	271.459.000,00	1 80 100	236.393.512,00	100%	87,08%

Sumber : Hasil olah data

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel maka penggunaan anggaran yang efektif dan efisien perlu dilakukan serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025, BPKAD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.296.099.853.338,39,-** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **970.240.626.787,04,-**

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Untuk mengukurnya dapat dilihat berikut ini :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

P	=	Penyerapan anggaran
RA	=	Akumulasi Realisasi Anggaran
PA	=	Akumulasi Pagu Anggaran
=		$\frac{1.296.099.853.338,39}{970.240.626.787,04} \times 100 \%$
=		74,86 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**TABEL 3.15**  
**CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
	<b>BPKAD</b>				
<b>PROGRAM</b>	<b>1.296.099.853.338,39</b>	<b>970.240.626.787,04</b>	<b>325.859.226.551,35</b>	<b>74,86%</b>	<b>25,14%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>244.430.023.812,77</b>	<b>156.881.231.751,00</b>	<b>87.548.792.061,77</b>	<b>64,18%</b>	<b>35,82%</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>853.654.950,73</b>	<b>789.599.929,00</b>	<b>64.055.021,73</b>	<b>92,50%</b>	<b>7,50%</b>
SUB KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	789.599.929,00	64.055.021,73	92,50%	7,50%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.258.679,00	42.386.271,73	75,31%	24,69%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	46.268.247,00	8.219.753,00	84,91%	15,09%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	43.495.997,00	3.204.003,00	93,14%	6,86%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	56.579.097,00	520.903,00	99,09%	0,91%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	48.850.000,00	212.464,00	99,57%	0,43%
SUB KEGIATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	474.872.000,00	465.360.373,00	98,00%	2,00%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>144.347.344.462,00</b>	<b>86.828.158.527,22</b>	<b>62,44%</b>	<b>37,56%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.646.875.382,00	86.771.469.757,22	62,34%	37,66%
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	341.690.000,00	336.680.596,00	98,53%	1,47%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.061.250,00	40.481.415,00	98,59%	1,41%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.250.000,00	104.982.021,00	97,89%	2,11%
SUB KEGIATAN	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200.945.100,00	153.670.410,00	76,47%	23,53%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.961.500,00	39.528.457,00	1.433.043,00	96,50%	3,50%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.250.000,00	25.126.181,00	123.819,00	99,51%	0,49%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>120.261.966,00</b>	<b>87.320.577,00</b>	<b>32.941.389,00</b>	<b>72,61%</b>	<b>27,39%</b>
SUB KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000,00	13.432.998,00	67.002,00	99,50%	0,50%
SUB KEGIATAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.467.050,00	26.112.931,00	31.354.119,00	45,44%	54,56%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.294.916,00	47.774.648,00	1.520.268,00	96,92%	3,08%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>721.459.125,00</b>	<b>591.303.552,00</b>	<b>130.155.573,00</b>	<b>81,96%</b>	<b>18,04%</b>
SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	102.701.150,00	81.856.995,00	20.844.155,00	79,70%	20,30%
SUB KEGIATAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.756.500,00	33.273.750,00	10.482.750,00	76,04%	23,96%
SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.074.475,00	16.141.996,00	47.932.479,00	25,19%	74,81%
SUB KEGIATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	214.382.000,00	176.949.990,00	37.432.010,00	82,54%	17,46%
SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	296.545.000,00	283.080.821,00	13.464.179,00	95,46%	4,54%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.315.690.082,32</b>	<b>1.249.086.193,00</b>	<b>66.603.889,32</b>	<b>94,94%</b>	<b>5,06%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.595.384,00	74.220.336,00	11.375.048,00	86,71%	13,29%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	181.911.050,00	165.424.721,00	16.486.329,00	90,94%	9,06%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	154.700.010,00	143.911.475,00	10.788.535,00	93,03%	6,97%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	222.066.638,32	216.820.048,00	5.246.590,32	97,64%	2,36%
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96,62%	3,38%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
		671.417.000,00	648.709.613,00	22.707.387,00		
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.107.507.036,76</b>	<b>2.962.307.360,00</b>	<b>145.199.676,76</b>	<b>95,33%</b>	<b>4,67%</b>
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.455.200,00	160.900.000,00	40.555.200,00	79,87%	20,13%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel	179.179.800,00	162.714.900,00	16.464.900,00	90,81%	9,19%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.202.843.256,00	2.119.258.260,00	83.584.996,00	96,21%	3,79%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	524.028.780,76	519.434.200,00	4.594.580,76	99,12%	0,88%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.532.880.498,00</b>	<b>4.306.520.674,00</b>	<b>226.359.824,00</b>	<b>95,01%</b>	<b>4,99%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.987.500,00	46.095.725,00	3.891.775,00	92,21%	7,79%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.520.639.992,00	1.452.846.413,00	67.793.579,00	95,54%	4,46%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.313.600,00	397.146.286,00	30.167.314,00	92,94%	7,06%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.534.939.406,00	2.410.432.250,00	124.507.156,00	95,09%	4,91%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.603.067.164,74</b>	<b>2.547.749.004,00</b>	<b>55.318.160,74</b>	<b>97,87%</b>	<b>2,13%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.061.550.000,00	1.049.365.304,00	12.184.696,00	98,85%	1,15%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.327.727.164,74	1.312.309.000,00	15.418.164,74	98,84%	1,16%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.790.000,00	186.074.700,00	27.715.300,00	87,04%	12,96%
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.035.297.949.655,62</b>	<b>798.212.673.671,04</b>	<b>237.085.275.984,58</b>	<b>77,10%</b>	<b>22,90%</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>5.413.746.225,00</b>	<b>5.309.767.905,00</b>	<b>103.978.320,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>1,92%</b>
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				98,13%	1,87%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
		535.313.150,00	525.293.368,00	10.019.782,00		
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	352.745.600,00	344.006.582,00	8.739.018,00	97,52%	2,48%
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	475.415.150,00	464.507.881,00	10.907.269,00	97,71%	2,29%
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	133.388.225,00	133.383.719,00	4.506,00	100,00%	0,00%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.817.831.100,00	1.798.771.175,00	19.059.925,00	98,95%	1,05%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	711.859.625,00	697.993.780,00	13.865.845,00	98,05%	1,95%
SUB KEGIATAN	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1.387.193.375,00	1.345.811.400,00	41.381.975,00	97,02%	2,98%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.048.726.182,00</b>	<b>1.034.766.226,00</b>	<b>13.959.956,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>1,33%</b>
SUB KEGIATAN	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	804.212.575,00	795.557.675,00	8.654.900,00	98,92%	1,08%
SUB KEGIATAN	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	244.513.607,00	239.208.551,00	5.305.056,00	97,83%	2,17%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>4.749.618.557,00</b>	<b>4.517.135.085,00</b>	<b>232.483.472,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>4,89%</b>
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	422.507.425,00	415.519.907,00	6.987.518,00	98,35%	1,65%
SUB KEGIATAN	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	492.994.980,00	492.445.014,00	549.966,00	99,89%	0,11%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	680.670.410,00	677.524.293,00	3.146.117,00	99,54%	0,46%
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	869.413.637,00	868.238.126,00	1.175.511,00	99,86%	0,14%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	226.103.400,00	211.895.257,00	14.208.143,00	93,72%	6,28%
SUB KEGIATAN	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	137.984.550,00	137.977.600,00	6.950,00	99,99%	0,01%
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	925.566.450,00	910.715.841,00	14.850.609,00	98,40%	1,60%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	994.377.705,00	802.819.047,00	191.558.658,00	80,74%	19,26%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.019.502.442.450,62</b>	<b>783.128.791.286,04</b>	<b>236.373.651.164,58</b>	<b>76,81%</b>	<b>23,19%</b>
SUB KEGIATAN	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	19.150.000.000,00	19.150.000.000,00	-	100,00%	0,00%
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00%	100,00%
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	999.852.442.450,62	763.978.791.286,04	235.873.651.164,58	76,41%	23,59%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>4.583.416.241,00</b>	<b>4.222.213.169,00</b>	<b>361.203.072,00</b>	<b>92,12%</b>	<b>7,88%</b>
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.044.045.000,00	991.835.084,00	52.209.916,00	95,00%	5,00%
SUB KEGIATAN	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.309.048.650,00	1.165.792.478,00	143.256.172,00	89,06%	10,94%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.142.201.368,00	1.076.157.128,00	66.044.240,00	94,22%	5,78%

SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.088.121.223,00	988.428.479,00	99.692.744,00	90,84%	9,16%
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>16.371.879.870,00</b>	<b>15.146.721.365,00</b>	<b>1.225.158.505,00</b>	<b>92,52%</b>	<b>7,48%</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>16.371.879.870,00</b>	<b>15.146.721.365,00</b>	<b>1.225.158.505,00</b>	<b>92,52%</b>	<b>7,48%</b>
SUB KEGIATAN	Penyusunan Standar Harga	174.969.550,00	164.908.384,00	10.061.166,00	94,25%	5,75%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	151.152.200,00	148.791.637,00	2.360.563,00	98,44%	1,56%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.266.443.150,00	1.044.220.064,00	222.223.086,00	82,45%	17,55%
SUB KEGIATAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah	11.865.996.870,00	11.091.876.538,00	774.120.332,00	93,48%	6,52%
SUB KEGIATAN	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.186.273.100,00	1.083.773.679,00	102.499.421,00	91,36%	8,64%
SUB KEGIATAN	Penilaian Barang Milik Daerah	690.696.400,00	667.260.659,00	23.435.741,00	96,61%	3,39%
SUB KEGIATAN	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	355.227.200,00	325.496.621,00	29.730.579,00	91,63%	8,37%
SUB KEGIATAN	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	289.343.600,00	263.891.290,00	25.452.310,00	91,20%	8,80%
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	120.318.800,00	120.108.981,00	209.819,00	99,83%	0,17%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	271.459.000,00	236.393.512,00	35.065.488,00	87,08%	12,92%

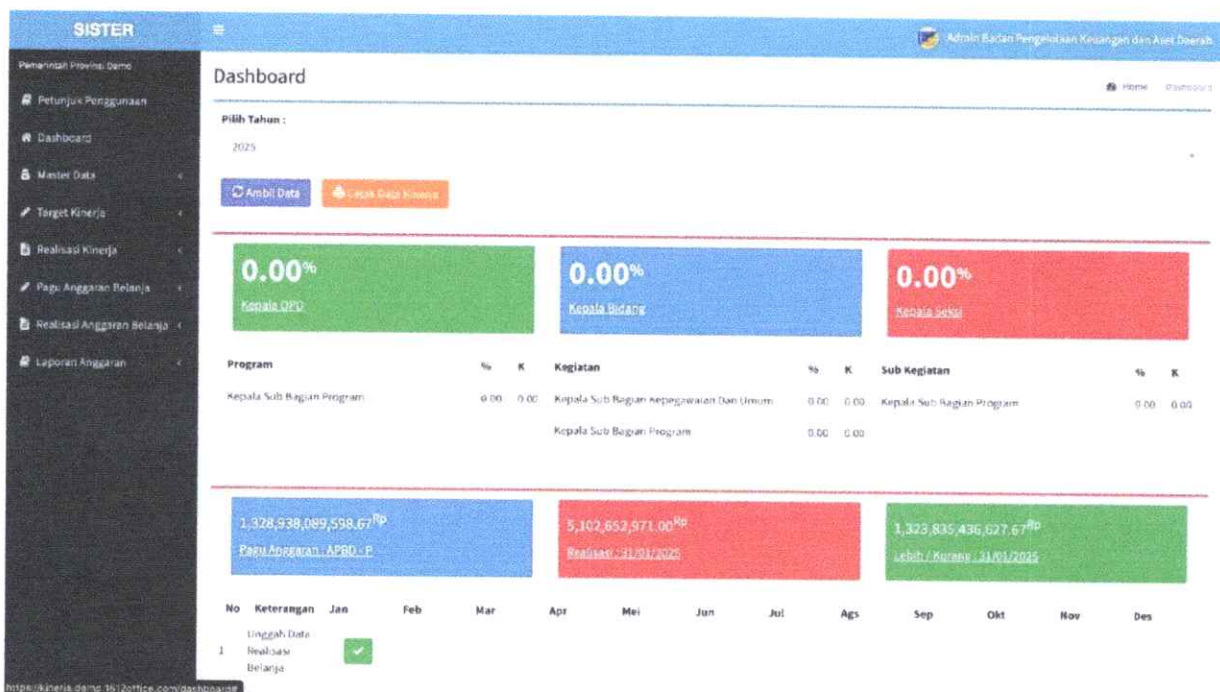
Sumber : Realisasi Anggaran BPKAD tahun 2025

### 3.3 INOVASI

Dalam mendukung kinerja BPKAD dalam membuat terobosan pengelolaan data dan pelaksanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebagai berikut:

Sekretariat

## Aplikasi SISTER Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi



Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SISTER) adalah Aplikasi tahun pembuatan 2025 yang dirancang untuk memudahkan Pimpinan dalam melakukan Evaluasi Kinerja BPKAD secara Realtime dan dapat memudahkan pimpinan dalam melakukan Evaluasi Kinerja bawahannya. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang berdampak pada pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

### 3.4 PENGHARGAAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapatkan Penghargaan sebagai berikut:



Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun **2023** karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai **85,65** dari nilai maksimum 100 dengan kategori **A**.



Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun **2024** karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai **87,90** dari nilai maksimum 100 dengan kategori **A**.



Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun **2025** karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai **85,10** dari nilai maksimum 100 dengan kategori **A**.



BPKAD Mendapatkan Penghargaan Peringkat 3 Kategori Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2024



## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja juga dapat dijadikan saran atau pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan capaian realisasi anggaran mencapai Rp. **970.240.626.787,04,-** atau 74,86% dari anggaran sebesar Rp. **1.296.099.853.338,39,-** dan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penyerapan anggaran belanja ini mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada indikator IPKD dapat kita lihat Tingkat kemajuan antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra di tahun 2029 sebesar 92,7%. Untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa hal yang perlu dilakukan bukan hanya oleh BPKAD sebagai penanggung jawab akan tetapi perlu juga komitmen kuat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada semua lini. Untuk mencapai tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pagu program pada Pembahasan RKPD dan KUAPPAS harus sesuai atau sama
- B. Pagu program pada Pembahasan KUAPPAS dan APBD harus sesuai atau sama
- C. Pengalokasian anggaran harus memehuni mandatory spending dan pemenuhan SPM yang telah disyaratkan beserta output dan capaiannya

- D. Akses informasi terhadap dokumen keuangan daerah harus dipublikasikan do website pemerintah provinsi sulaweis Tengah paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya dokumen yang disyaratkan
- E. Penyerapan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi tengah harus mencapai minimal 80%
- F. Kondisi Keuangan daerah yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, akan tetapi bergantung pada PAD
- G. Opini BPK terhadap LKPD harus WTP di tiap tahunnya

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan. tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian Laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan Sulawesi Tengah lebih maju lagi.



**LAMPIRAN**  
**PK AWAL 2025**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**H. RUSDY MASTURA**

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	3,03

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 486.981.643.899,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 838.144.445.699,00	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.812.000.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.328.938.089.598,00</b>	

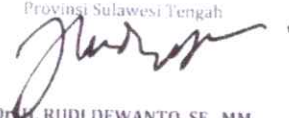
Gubernur Sulawesi Tengah



**H. RUSDY MASTURA**

Palu, 30 Januari 2025

Pt. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. RUDI DEWANTO, SE., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ANITA SORAYA S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710724 200003 1 003

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

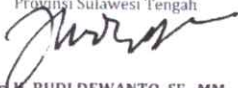
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKAD	Nilai Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	93,02
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai Sakip BPKAD	87,91
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	100 %
	- Tersusunnya Dokumen Bukti Pendukung Dalam E Sakip Reviu (ESR) Kemenpan	Jumlah Dokumen Pendukung e-Sakip Reviu Kemenpan RB Yang Tersusun	9 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses Bisnis	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses Bisnis Yang Tersusun	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen DPA BPKAD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian IKU PD	7 Dokumen
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan BPKAD dan Penyelesaian Tindakanlanjuti Hasil Pemeriksa (TLHP)	Persentase TLHP BPK dan APIP Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	49
		Persentase Capaian Realisasi APBD BPKAD	75
	- Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan TPP Lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen Usulan Gaji dan Tunjangan ASN)	Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan Yang Ditindaklanjuti Menjadi SPM	100%
	- Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban BPKAD	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Yang Diverifikasi dan Ditindaklanjuti Menjadi SPM	100 %
	- Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Akuntansi BPKAD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Tersusun	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Bahan Tenggapan dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksa	Persentase Bahan Tenggapan dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksa Yang Tersusun	100 %
	- Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	1 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD Yang Sesuai Ketentuan	100%
	- Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	2 Dokumen
	- Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diamankan Lingkup BPKAD	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
4	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN Ber-AKHLAK	65
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	20
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindakanlanjuti Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65
		Persentase Tindakanlanjuti Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	65
6	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegritas	81,74
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Pada BPKAD	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelola Kearsipan Digital BPKAD	65
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di pelihara	65

#### PROGRAM

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 393.975.021.311,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 780.824.450,73	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 158.891.450,73	
- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 56.301.000,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 67.950.000,00	

-	Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp	60.350.000,00
-	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	48.850.000,00
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	388.482.000,00
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	477.240.072.046,50
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	476.211.478.196,50
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	305.640.000,00
-	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	41.061.250,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	40.961.500,00
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	25.250.000,00
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	508.431.100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	107.250.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	127.361.966,00
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	13.500.000,00
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	56.327.050,00
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	57.534.916,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	627.876.200,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	850.170.560,00
6	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp	1.261.664.883,76
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	4.597.363.754,50
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.496.310.036,91

Plt. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
Sekretaris  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**ANITA SOBAYA S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19841121 200212 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKILA, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Prov. Sulteng  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**ANITA SORAYA S.STP.,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN  
UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**SAKILA, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720909 200003 2 007

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65
		Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Bagi Pegawai BPKAD	- Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	138 Paket
	- Terupdatanya Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN BPKAD	- Persentase Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN Yang Terupdate	100%
	- Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	- Jumlah Pegawai Yang Dinilai Kinerjanya	135 Orang
	- Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Yang Dibina Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang
	- Terbinanya ASN Tentang Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	- Jumlah ASN Yang Mendapat Pembinaan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	100 Orang
	- Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipublikasi	- Jumlah Dokumen Yang Dipublikasi	29 Dokumen
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	20
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	65
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup BPKAD	- Jumlah Paket Instalasi Listrik	1 Paket
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD	- Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Yang Disediakan	5 Paket
	- Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 Paket
	- Tersusunnya Produk Hukum ( Pergub, Perda, DII) BPKAD	- Persentase Hukum Yang Disusun	100 %
	- Terkomilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI Yang Tekomplikasi	1 Dokumen
	- Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor di BPKAD	- Persentase Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor Yang Ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendering, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Yang Dimanfaatkan	1 Laporan
		- Jumlah Paket Mebel Yang Menggunakan Sistem Elektronik	1 Paket
	- Tersusunnya Laporan P3DN Sesuai TKDN	- Jumlah Laporan P3DN Sesuai TKDN Yang Disusun	1 Laporan
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendering, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Pengadaan Gedung Yang Menggunakan Sistem Elektronik	1 Unit
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi SKM Terintegrasi	81.74
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Pada BPKAD	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	65
	- Terkelolanya Arsip Dinas Berbentuk Fisik dan Digital BPKAD	- Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik Dan Digital Yang Dikelola	90%
	- Terkelolanya Arsip Statis BPKAD	- Persentase Arsip Statis Yang Dikelola	90%
	- Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE BPKAD	- Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Yang Tersusun	2 Dokumen
	- Tersedianya Data Sektoral BPKAD	Jumlah Laporan Data Sektoral	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan BPKAD (SP, MP, dan Laporan SKM)	- Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan Yang Disusun	3 Dokumen
	- Terukurnya SKM Pada Layanan BPKAD	- Jumlah Jenis Layanan Yang Diukur Dengan SKM	46 Jenis

5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik daerah	65
	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
	- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	3 Bangunan
	- Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	3 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 627.876.200,00	Sumber dana yang digunakan pada semua Kegiatan ini adalah APBD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 41.951.150,00	
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Rp 62.976.500,00	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 85.362.000,00	
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 143.853.550,00	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 293.733.000,00	
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 850.170.560,65	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 39.421.677,00	
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 78.914.400,00	
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 35.362.900,00	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 88.079.583,65	
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 608.392.000,00	
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.261.664.883,76	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 219.000.000,00	
- Pengadaan Mebel	Rp 26.247.600,00	
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 601.099.545,00	
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 415.317.738,76	
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.597.363.754,00	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 49.987.500,00	
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.490.320.400,00	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 243.793.600,00	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.813.262.254,00	
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.496.310.036,91	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 902.870.000,00	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 466.850.036,91	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 126.590.000,00	

Sekretaris  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**ANITA SORAYA S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 30 Januari 2025  
Kepala Sub Bagian  
Kepegawaian dan Umum



**SAKILA S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720909 200003 2 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HARIS, SE., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. HARIS, SE., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780127 200212 1 005

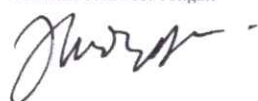
### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD	Nilai IPKD Dimensi Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD	15
	Meningkatnya Kualitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8,5
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	100
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	100
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	100
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	13 Surat Keputusan
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13 Surat Keputusan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran)	Rp 4.146.909.025,00	Sumber dana yang
1 Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 4.146.909.025,00	digunakan pada
2 Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 726.252.382,00	semua kegiatan ini
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp 508.368.375,00	adalah APBD
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rp 217.884.007,00	

Plt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Bidang Anggaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**A. HARIS, SE., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780127 200212 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKHRUDDIN NUR, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. HARIS, SE., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780117 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN  
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**FAKHRUDDIN NUR, ST**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19781217 201001 1 002

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Produk Hukum
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Produk Hukum
	- Terbinaanya Aparatur Pengelolah Perencana Penganggaran Daerah Diperangkat Daerah Provinsi	- Jumlah Aparatur Yang terbina	266 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 2.761.027.050,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Derah Tentang Penjabaran APBD	Rp 1.667.834.800,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 334.250.875,00	
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Rp 758.941.375,00	

Kepala Bidang Anggaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

**A. HARIS, SE., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Penyusunan Anggaran

**FAKHRUDDIN NUR, ST**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19781217 201001 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN MASCATTY, SE  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Manajemen Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



**A. HARIS, SE., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG MANAJEMEN  
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FARHAN MASCATTY, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760427 199603 1 002

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK	- Jumlah Dokumen ASB dan HSPK	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA & Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
	- Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah	- Jumlah RKA- SKPD Perang Daerah Yang Diverifikasi	53 Dokumen
	- Terverifikasi DPA-SKPD Perangkat Daerah	- Jumlah DPA-SKPD Perangkat Daerah yang Diverifikasi	53 Dokumen

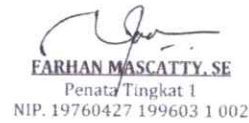
KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.385.881.975,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 504.006.250,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 245.383.600,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 462.633.900,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 173.858.225,00	

Kepala Bidang Anggaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**A. HARIS, SE, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Manajemen Anggaran



**FARHAN MASCATTY, SE**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19760427 199603 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. FATNINI, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dra. FATNINI, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 198903 2 007

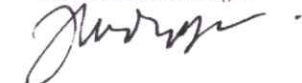
### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kondisi Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	4.2
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	- Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	24 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	- Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	10 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi	- Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi	4 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	- Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	2 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi TASPEN dan BPJS	- Jumlah Laporan Berita Acara	
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	17 Laporan
B	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan Anggaran	15
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN)	Rp 3.763.701.557,00	Sumber dana yang digunakan
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 1.441.719.250,00	pada semua program ini adalah APBD
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 298.314.450,00	
- Kordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi kas	Rp 269.644.550,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 298.126.800,00	
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi Terkait	Rp 585.633.450,00	
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 825.249.999.994,62	

Plt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Bidang  
 Perbendaharaan



**Dra. FATNINI, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690710 198903 2 007



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN WAHYULIANI, SE.,MM  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dra. FATNINI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK  
LANGSUNG PERBENDAHARAAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DIAN WAHYULIANI, SE., MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19810709 200604 2 034

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	- Tersusunnya Dokumen SP2D	- Jumlah Dokumen SP2D	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Kas Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	- Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	2 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
	- Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah Laporan Bantuan Keuangan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat	Jumlah Laporan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi	- Jumlah Laporan	4 Laporan

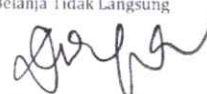
KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 894.020.210,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 595.893.410,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)	Rp 298.126.800,00	
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 825.249.999.994,62	
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 2.250.000.000,00	
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 16.500.000.000,00	
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp 806.499.999.994,62	

Kepala Bidang Perbendaharaan  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Dra. RYTNINI, M.Si**  
 Pembina Tingkat 1  
 NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Belanja Tidak Langsung



**DIAN WAHYULIANI, SE., MM**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19810709 200604 2 034



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HONEL MANUSU, SE., M.Si  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dra. FATNINI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG  
PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**HONEL MANUSU, SE., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19671002 199203 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	- Tersedianya Penyediaan Dana APBD	- Jumlah Dokumen Penyediaan Dana APBD	4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	- (Jumlah Laporan Dana Alokasi Umum (DAU), Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	20 Laporan
	- Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen SP2D	Jumlah Dokumen SP2D	4 Dokumen
	- Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Perangkat Daerah	- Jumlah Aparatur Yang Tersosialisasi	100 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 2.321.982.307,00	
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 492.318.490,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Kordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya	Rp 439.162.642,00	
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	Rp 794.607.765,00	
- PenataUsahaan Pembiayaan Daerah	Rp 595.893.410,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

  
**Dra. FAENINI, M.Si**  
 Pembina Tingkat 1  
 NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Belanja Langsung

  
**HONEL WANUSU, SE., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19671002 199203 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19801019 200804 1 002

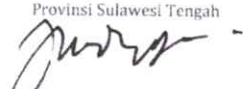
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atau Unqualified Opinion	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menyajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, Posisi Keuangan, Hasil Usaha, dan Arus Kas Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum Di Indonesia	100%
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standae Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
-	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi,	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	225 Rancangan Peraturan


PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Rp 4.257.582.741,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.035.622.118,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 1.035.622.118,00	

Plt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**D. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Bidang  
 Akuntansi



**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19801019 200804 1 002



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBYANTHY RATMAN, SAK., MM  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DEBBYANTHY RATMAN, SE.Ak., MM**  
Pembina  
NIP. 19850225 200804 2 003

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
-	Tersusunnya Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	82 Laporan
-	Tersusunnya Dokumen Sistem Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 2.274.195.373,00	Sumber dana yang
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.257.720.500,00	digunakan pada
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.016.474.873,00	semua kegiatan ini adalah APBD

Kepala Bidang Akuntansi  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Akuntansi dan Pelaporan



**DEBBYANTHY RATMAN, SE. Ak., MM**  
 Pembina  
 NIP. 19850225 200804 2 003



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD FAJRI, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
Pembina  
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI  
MANAJEMEN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**MOHAMAD FAJRI, ST**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19810523 200801 1 006

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI MANAJEMEN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
-	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	400 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 947.765.250,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Rp 947.765.250,00	

Kepala Bidang Akuntansi  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Ir. IDHAMSYAH, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Akuntansi Manajemen



**MOHAMAD FAJRI, ST**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19810523 200801 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUASTINA, SH.,MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET  
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUASTINA, SH., MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730726 20003 2 004

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aset Daerah	Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Diperangkat Daerah	2 Laporan
	- Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.812.000.000,00	Sumber dana
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 952.011.400,00	yang digunakan
- Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 715.432.950,00	pada semua
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 236.578.450,00	program ini
2 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.325.557.100,00	adalah APBD
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 652.965.750,00	

Plt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Bidang  
 Pengelolaan Aset Daerah



**SUASTINA, SH., MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730726 200003 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR GAMAR, SE., MSA  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUASTINA, SH., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NUR GAMAR, SE., MSA  
Penata Tingkat I  
NIP. 19820419 200502 2 003

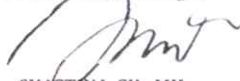
### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Buku Standar Harga	- Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku
	- Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Neraca BMD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca BMD	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Pendukung LK	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun	80 Laporan
	Penilaian Pemanfaatan BMD di Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Usulan Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMD	100
	- Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PD (Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan)	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2 Surat Keputusan
	- Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah Berita Acara rekonsiliasi	242 Berita Acara
	- Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.230.457.450,00	Sumber dana yang
- Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp 164.914.850,00	digunakan pada
- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 218.108.300,00	semua kegiatan ini
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 205.466.750,00	adalah APBD
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 106.592.700,00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 1.259.149.350,00	
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 276.225.500,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**SUASTINA, SH., MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730726 200003 2 004

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Perencanaan dan Penatausahaan Aset



**NUR GAMAR, SE., MSA**  
 Penata Tingkat 1  
 NIP. 19820419 200502 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ,S.Sos. M.Si  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

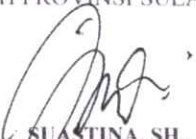
Nama : SUASTINA, SH., MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

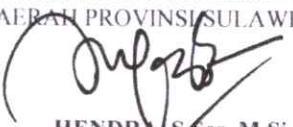
PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
SUASTINA, SH., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN  
PEMINDAHTANGANAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
HENDRA, S.Sos. M.Si  
Pembina  
NIP. 19701008 200701 1 019

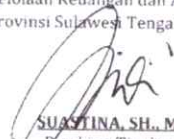
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

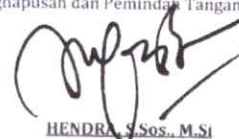
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemenuhan Dokumen Pemindahtanganan BMD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Kordinasi Penilaian Barang milik Daerah	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 629.531.150,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 412.105.600,00	
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 217.425.550,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

  
**SUASTINA, S.H., MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 30 Januari 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Penghapusan dan Pemindah Tangan Aset

  
**HENDRA, S.Sos., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 196501011990031 044



**LAMPIRAN**  
**PK PERUBAHAN 2025**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR HAFID  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



**ANWAR HAFID**

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 244.430.023.812,77	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.035.297.949.655,62	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 16.371.879.870,00	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.296.099.853.338,39</b>	

Gubernur Sulawesi Tengah



**ANWAR HAFID**

Palu, 11 Desember 2025

Plt. Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701209 199103 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ANITA SORAYA S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710724 200003 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**


SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,86 Indeks
	Meningkatnya Kualitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	12.34 Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai Sakip BPKAD	87,91 Nilai
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	100 %
	Tersusunnya Dokumen Bukti Pendukung Dalam E-Sakip Reviu (ESR) Kemenpan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses Bisnis		2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	- Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-BPKAD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen DPA BPKAD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA BPKAD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan BPKAD dan Penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksa (TLHP)	Persentase TLHP BPK dan APIP Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	49 %
		Persentase Capaian Realisasi APBD BPKAD	75 %
	- Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP Lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen Usulan Gaji dan Tunjangan ASN)	- Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100%
	- Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan BPKAD dalam Penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksa (TLHP)	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 %
	- Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Akuntansi BPKAD	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindakanlanjut Hasil Pemeriksa	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa dan Tindakanlanjut Pemeriksa	100 %
	- Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD Yang Sesuai Ketentuan	100%
	- Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
	- Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	2 Dokumen
4	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65 Indeks
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN Ber-AKHLAK	65 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%

5	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan SP4N Lapor	20 Nilai
		Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	65 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65 %
6	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65 Nilai
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65 Nilai
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegritas	81.74 Nilai
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Pada BPKAD	65 Nilai
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	65 Nilai
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di pelihara	65 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 244.430.023.812,77	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 853.654.950,73	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 171.644.950,73	
- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 54.488.000,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 46.700.000,00	
- Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 57.100.000,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 48.850.000,00	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 474.872.000,00	
<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 231.175.502.989,22	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 230.418.345.139,22	
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 341.690.000,00	
- Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 41.061.250,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 107.250.000,00	
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 200.945.100,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 40.961.500,00	
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 25.250.000,00	
<b>3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Rp 120.261.966,00	
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 13.500.000,00	
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 57.467.050,00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 49.294.916,00	
<b>4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp 721.459.125,00	
<b>5 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 1.315.690.082,32	
<b>6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Rp 3.107.507.036,76	
<b>7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 4.532.880.498,00	
<b>8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 2.603.067.164,74	

Plt. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

  
**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025

Sekretaris  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

  
**ANITA SORAYA S. STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19841121 200212 2 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKILA, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Prov. Sulteng  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si  
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ANITA SORAYA S.STP.,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19841121 200212 2 001

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN  
UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SAKILA, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720909 200003 2 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT  
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65 Indeks
		Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Bagi Pegawai BPKAD	- Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	138 Paket
	- Terupdatenya Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN BPKAD	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%
	- Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	135 Orang
	- Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
	- Terbinanya ASN Tentang Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	- Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang
- Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipublikasi	- Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Dokumen	
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	20 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65 Nilai
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	65 %
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup BPKAD	- Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD	- Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	5 Paket
	- Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 Paket
	- Tersusunnya Produk Hukum ( Pergub, Perda, Dll) BPKAD	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	100 %
	- Terkomilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor di BPKAD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen 100 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65 Nilai
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendring, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan P3DN Sesuai TKDN	- Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendring, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	1 Laporan
		- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65 Nilai
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi SKM Terintegrasi	81.74 Nilai
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Pada BPKAD	65 Nilai
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	65 Nilai
	- Terkelolanya Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital BPKAD	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90%
	- Terkelolanya Arsip Statis BPKAD		90%
	- Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE BPKAD	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	2 Dokumen
	- Tersedianya Data Sektoral BPKAD	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan BPKAD (SP, MP, dan Laporan SKM)	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Dokumen
	- Terukurnya SKM Pada Layanan BPKAD		46 Dok

5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	65 %
-	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit
-	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitas	3 Bangunan
-	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitas	3 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp 721.459.125,00	Sumber dana yang digunakan pada semua Kegiatan ini adalah APBD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 102.701.150,00	
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Rp 43.756.500,00	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 64.074.475,00	
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 214.382.000,00	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 296.545.000,00	
<b>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 1.315.690.082,32	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 85.595.384,00	
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 181.911.050,00	
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 154.700.010,00	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 222.066.638,32	
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 671.417.000,00	
<b>3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp 3.107.507.036,76	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 201.455.200,00	
- Pengadaan Mebel	Rp 179.179.800,00	
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 2.202.843.256,00	
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 524.028.780,76	
<b>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp 4.532.880.498,00	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 49.987.500,00	
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.520.639.992,00	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 427.313.600,00	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.534.939.406,00	
<b>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Rp 2.603.067.164,74	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.061.550.000,00	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.327.727.164,74	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 213.790.000,00	

Sekretaris  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

  
**ANITA SORAYA S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 11 Desember 2025  
Kepala Sub Bagian  
Kepegawaian dan Umum

  
**SAKILA S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720909 200003 2 007



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HARIS, SE., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. HARIS, SE., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780127 200212 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Nilai IPKD Dimensi Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD	17,43%
	Meningkatnya Kualitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,70%
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	100 %
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	100 %
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	13 Surat Keputusan
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13 Surat Keputusan

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran)	Rp	6.462.472.407,00	Sumber dana yang
1 Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	5.413.746.225,00	digunakan pada
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.048.726.182,00	semua kegiatan ini
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp	804.212.575,00	adalah APBD
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rp	244.513.607,00	

Pt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Bidang Anggaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**A. HARIS, SE., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780127 200212 1 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN MASCATTY, SE  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Manajemen Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. HARIS, SE., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG MANAJEMEN  
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**FARHAN MASCATTY, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760427 199603 1 002


## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Manajemen Anggaran Yang Disusun	100%
	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS		2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA & Perubahan PPAS	- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
	- Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah	- Jumlah RKA- SKPD Yang Diverifikasi	53 Dokumen
	- Terverifikasi DPA-SKPD Perangkat Daerah	- Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.496.862.125,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 535.313.150,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 352.745.600,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 475.415.150,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 133.388.225,00	

Kepala Bidang Anggaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

  
**A. HARIS, SE, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Manajemen Anggaran

  
**FARHAN MASCATTY, SE**  
 Penata Tingkat 1  
 NIP. 19600907 198503 2 007



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKHRUDDIN NUR, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**A. HARIS, SE., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN  
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**FAKHRUDDIN NUR, ST**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19781217 201001 1 002

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Produk Hukum
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Produk Hukum
	- Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencana Penganggaran Daerah Diperangkat Daerah Provinsi	- Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	266 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 3.916.884.100,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Rp 1.817.831.100,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 711.859.625,00	
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Rp 1.387.193.375,00	

Kepala Bidang Anggaran  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**A. HARI S. SE., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Penyusunan Anggaran



**FAKHRUDDIN NUR. ST**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19781217 201001 1 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. FATNINI, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

  
**Dra. FATNINI, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 198903 2 007

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah	15 Nilai
	Meningkatnya Kondisi Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	4.2 Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Belanja Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen
	- Tersedianya Penyediaan Dana APBD	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas SPD	4 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen SP2D	- Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang di Tentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Laporan Tepra	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Laporan
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	- Jumlah Laporan Realsasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2 Dokumen
	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	10 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi		4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	17 Laporan
	- Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Ke Perangkat Daerah	- Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Panatusahaan Keuangan Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%

### PROGRAM

	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN)	Rp 1.024.252.061.007,62	Sumber dana
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 4.749.618.557,00	yang digunakan
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 422.507.425,00	pada semua
- Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran SPD	Rp 492.994.980,00	program ini
		adalah APBD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 680.670.410,00	
- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 869.413.637,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Kegita (PFK)	Rp 226.103.400,00	

- Kordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi kas	Rp	137.984.550,00
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan instansi Terkait	Rp	925.566.450,00
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp	994.377.705,00
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.019.502.442.450,62

Plt. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
Kepala Bidang  
Perbendaharaan



**Dra. FATNINI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 198903 2 007



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN WAHYULIANI, SE.,MM  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dra. FATNINI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690710 198903 2 007

KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK  
LANGSUNG PERBENDAHARAAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DIAN WAHYULIANI, SE., MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19810709 200604 2 034

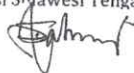
## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	- Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	- Jumlah Laporan Realsasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
	- Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 906.773.810,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 680.670.410,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 226.103.400,00	
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.019.502.442.450,62	
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 19.150.000.000,00	
- Tersusunnya laporan Pengelolaan Dana Darurat	Rp 500.000.000,00	
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp 999.852.442.450,62	

Kepala Bidang Perbendaharaan  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Dra. FATNINI.M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Belanja Tidak Langsung



**DIAN WAHYULIANI.SE**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19810709 200604 2 034



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19801019 200804 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion	Nilai IPKD Dimensi Opini BPK terhadap LKPD	100%
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	225 Rancangan
2	Meningkatnya Kualitas Akuntansi Manajemen	Persentase Dokumen Akuntansi Manajemen Yang Disusun	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Yang Disusun	100%

**PROGRAM**

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Rp 1.142.201.368,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.142.201.368,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 1.142.201.368,00	

Plt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. RUJDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Bidang  
 Akuntansi

**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19801019 200804 1 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD FAJRI, ST  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
Pembina  
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI  
MANAJEMEN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**MOHAMAD FAJRI, ST**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19810523 200801 1 006

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI MANAJEMEN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntansi Manajemen	Persentase Dokumen Akuntansi Manajemen Yang Disusun	100%
-	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	400 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.044.045.000,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Rp 1.044.045.000,00	

Kepala Bidang Akuntansi  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Ir. IDHAMSyah, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Akuntansi Manajemen



**MOHAMAD FAJRI, ST**  
 Penata Tingkat I  
 NIP.19810523 200801 1 006



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBYANTHY RATMAN, SAK., MM  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. IDHAMSyah, ST., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DEBBYANTHY RATMAN, SE.Ak., MM  
Pembina  
NIP. 19850225 200804 2 003

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	82 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Sistem Dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 2.397.169.873,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.309.048.650,00	
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Rp 1.088.121.223,00	

Kepala Bidang Akuntansi  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**Ir. IDHAMSYAH, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Akuntansi dan Pelaporan



**DEBYANTHY RATMAN, SE.Ak., MM**  
 Pembina  
 NIP. 19850225 200804 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUASTINA, SH.,MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM  
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET  
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701209 199103 1 001

**SUASTINA, SH., MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730726 20003 2 004

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)	2,76 Indeks
		- Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	9,78 Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aset Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
	- Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.541.500.300,00	Sumber dana
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.541.500.300,00	yang digunakan
- Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 1.186.273.100,00	pada semua
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 355.227.200,00	program ini
		adalah APBD

Plt. Kepala Badan  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Bidang  
 Pengelolaan Aset Daerah

**SUASTINA, SH., MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730726 200003 2 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR GAMAR, SE., MSA  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUASTINA, SH., MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**NUR GAMAR, SE., MSA**  
Pembina  
NIP. 19820419 200502 2 003

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
-	Tersusunnya Buku Standar Harga	- Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku
-	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
-	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Neraca BMD	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun	1 Laporan
-	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Pendukung LK		80 Laporan
-	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PD(Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan)	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2 Surat Keputusan
-	Tersusunnya Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan
-	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	242 Berita Acara

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 13.850.339.570,00	Sumber dana yang
- Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp 174.969.550,00	digunakan pada
- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 11.865.996.870,00	semua kegiatan ini
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 271.459.000,00	adalah APBD
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 151.152.200,00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 1.266.443.150,00	
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 120.318.800,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah

**SUASTINA.SH., MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730726 200003 2 004

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Perencanaan dan Penatausahaan Aset

**NUR GAMAR.SE., MSA**  
 Pembina  
 NIP. 19820419 200502 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ,S.Sos. M.Si  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah  
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUASTINA, SH., MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 11 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN  
PEMINDAHTANGANAN ASET  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**HENDRA, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19701008 200701 1 019

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN ASET  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemenuhan Dokumen Pemindahtanganan BMD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Kordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		4 Laporan

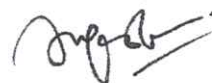
KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 980.040.000,00	Sumber dana yang
- Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 690.696.400,00	digunakan pada
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 289.343.600,00	semua kegiatan ini adalah APBD

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**SUASTINA, S.H., M.H**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730726 200003 2 004

Palu, 11 Desember 2025  
 Kepala Sub Bidang  
 Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset



**HENDRA, S.Sos., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 196501011990031 044